



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Provinsi Kalimantan Utara secara resmi terbentuk sejak ditandatanganinya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 16 November 2012 oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara bertujuan untuk mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, memperpendek rentang kendali (*span of control*) pemerintahan, terutama di kawasan perbatasan. Pemerintah Pusat berharap dengan adanya pemerintahan provinsi, permasalahan di perbatasan utara Kalimantan dapat langsung dikontrol dan dikendalikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Diharapkan juga dengan adanya Provinsi Kaltara dapat meningkatkan perekonomian warga Kalimantan Utara yang berada di dekat perbatasan dengan negara-negara tetangga.

Salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan pencapaian target Pemerintah Daerah yaitu penataan Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tergabung di dalam pemerintah daerah tersebut. Sebagai upaya memenuhi kebutuhan perubahan struktur pemerintahan dari yang sebelumnya tergabung dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara dan sebagai bentuk perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dalam hal administrasi, pelaksana dan juga kontrol kebijakan maka dibentuklah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara.



Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara. Dinas Sosial mempunyai tugas pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 yaitu melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan Pasal 10 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan provinsi Kalimantan Utara, dinyatakan bahwa “Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Gubernur Kalimantan Utara dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembentukan struktur organisasi dan pengisian perangkat daerah, pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan fasilitasi pemilihan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD dan ILPD kepada Masyarakat, dinyatakan bahwa “Penjabat kepala daerah otonom baru menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Presiden melalui Menteri bagi penjabat gubernur dan kepada Menteri melalui gubernur bagi penjabat bupati/walikota sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali”.

Sehubungan dengan peraturan tersebut setiap SKPD wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan masing-masing SKPD. Hal ini bertujuan melihat sampai sejauh mana suatu satuan kerja perangkat daerah melaksanakan dan memperlihatkan kinerja organisasinya, serta sekaligus untuk mendorong adanya



peningkatan kinerja instansi pemerintah diatas, maka evaluasi kinerja tersebut perlu dilakukan. Dengan adanya evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah untuk secara konsisten dapat meningkatkan kinerjanya dalam rangka mewujudkan pencapaian kinerja hasil organisasinya.

Berkaitan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Laporan Pelaksanaan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara adalah:

- a. Memberikan gambaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Dinsos Provinsi Kalimantan Utara;
- b. Sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan.

Tujuan yang diharapkan dari penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan introspeksi internal demi penyempurnaan kebijakan dan peningkatan pencapaian kinerja.
- b. Sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan kinerja periode berikutnya.

## BAB II

### GAMBARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

#### A. Sejarah SKPD

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 05 Tahun 2016, mempunyai tugas pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 adalah: Melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Sebelumnya kantor masih bergabung dengan Dinsosnakertrans Jl. Katamso dan Saat ini Kantor Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara terletak di Jl. Sengkawit RT. RW. Tanjung Selor. Sejak didirikan kantor Dinsos belum memiliki kantor tetap dan status kantor masih sewa hingga saat ini.



Gambar 2.1 Saat Kantor Masih Bergabung Dengan Dinsosnakertrans  
Tahun 2016

*(Sumber: Dokumentasi Dinas)*



Gambar 2.2 Kantor Dinsos Tahun 2017 di Jln Sengkawit Tanjung Selor.

*(Sumber: Dokumentasi Dinas)*



Gambar 2.2 Kantor Dinsos Tahun 2018 di Jln Sengkawit Tanjung Selor.

*(Sumber: Dokumentasi Dinas)*



## **B. Gambaran Organisasi Perangkat Daerah**

### **b.1. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas**

#### **1) Tugas**

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 05 Tahun 2016, mempunyai tugas pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 adalah: Melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Otonomi dan Tugas Pembantuan .

#### **2) Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penengana warga Negara migran korban tindak kekerasan;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial;



5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang taman makam pahlawan;
6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
7. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
8. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Secara struktural Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara, terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 2 (dua) Bidang dan membawahi 1 UPTD yaitu Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Marga Rahayu.

Susunan Organisasi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara No 21 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
  - a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial, membawahi:
  - a) Seksi Rehabilitasi Sosial
  - b) Seksi Perlindungan Jaminan Sosial
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin membawahi :
  - a) Seksi Pemberdayaan Sosial

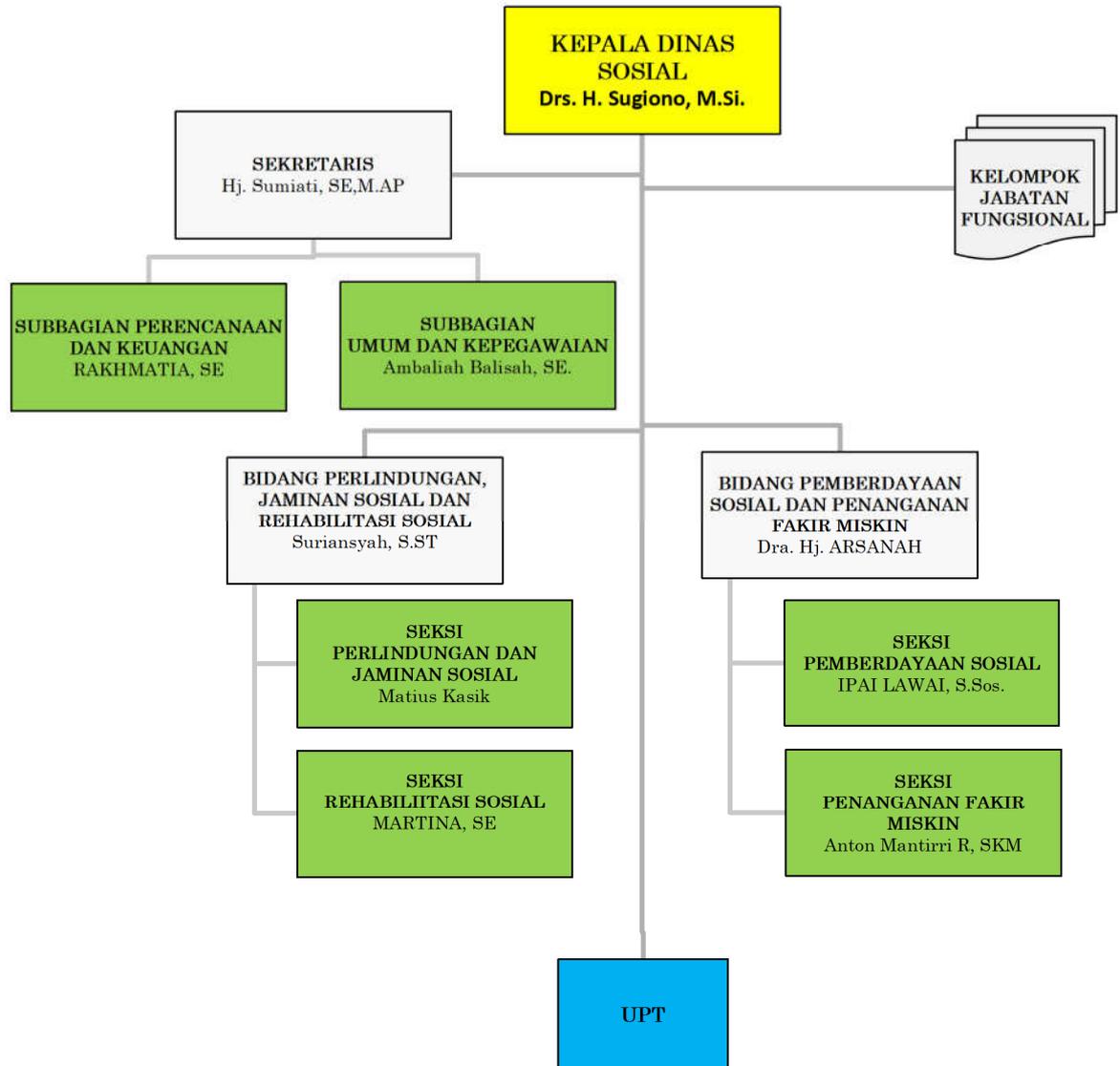


b) Seksi Penanganan Fakir Miskin

5. Unit Pelaksana Teknis
6. Kelompok Jabatan Fungsional



## STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA



Gambar 2.4 Struktur Organisasi Dinas Sosial Prov. Kaltara  
(Sumber: Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara No 21 Tahun 2016 Lampiran IV)



### a. Bidang Sekretariat

Tugas pokok dan fungsi Bidang Sekretariat dapat diuraikan sebagai berikut:

- Tugas

Memberikan pelayanan administratif urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, urusan perizinan, protocol dan surat menyurat kepada satuan organisasi Dinas Sosial serta menyiapkan bahan – bahan evaluasi kegiatan penyusunan program peraturan perundang – undangan.

- Fungsi

- a. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan program serta mengumpulkan dan mengolah data dan laporan.

- b. Melaksanakan pengelolaan urusan evaluasi dan laporan.

- c. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, urusan perizinan, protokol dan surat menyurat.

- Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri dari:

- a. Sub. Bag Perencanaan dan Keuangan

- b. Sub Bag Umum dan Kepegawaian

- Kepala Sub Bagian Dinsos mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bagian Perencanaan Program



- berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan.
2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
  3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
  4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.
  5. Menyiapkan bahan penyusunan RKA, DPA, DIPA, LAKIP sesuai peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan kegiatan.
  6. Menyiapkan bahan koordinasi penetapan standar pelayanan minimal UPTD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk acuan dalam melaksanakan tugas.
  7. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai.
  8. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan perencanaan program dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas.
  9. Mengevaluasi dan menyiapkan bahan laporan realisasi anggaran secara periodik berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan



yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya.

10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

#### **b. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial Dan Rehabilitasi Sosial**

- Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial Dan Rehabilitasi Sosial mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :
  1. Merencanakan operasional program Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial sesuai dengan kebijakan Kepala Dinas agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
  2. Membagi tugas kepada seksi Rehabilitasi Sosial dan seksi Perlindungan Jaminan Sosial sesuai dengan kewenangan masing-masing agar tugas terlaksana dengan baik;
  3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas seksi Rehabilitasi Sosial dan seksi Perlindungan Jaminan Sosial sesuai dengan kewenangan masing-masing agar tugas terlaksana dengan baik;
  4. Mengawasi pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial sesuai dengan Kebijakan Kepala Dinas agar



- pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
5. Melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, serta Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  6. Melaksanakan Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Jaminan Sosial Keluarga baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  7. Melaksanakan Pelayanan Sosial Anak Balita serta Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia dan Pengangkatan Anak oleh orang tua tunggal baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  8. Melaksanakan Pelayanan Sosial Orang dengan HIV / AIDS (ODHA) dan Pelayanan Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  9. Melaksanakan kegiatan Kesiapsiagaan dan Mitigasi, Penanganan Korban Bencana Alam, Pemulihan dan Penguatan Sosial serta Kemitraan dan Pengelolaan Logistik Bencana baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku;

10. Melaksanakan Kegiatan Pencegahan, Penanganan Korban Bencana Sosial, Politik dan Ekonomi, serta Pemulihan Sosial dan Reintegrasi Sosial baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  11. Melaksanakan Seleksi, Verifikasi, Terminasi dan Kemitraan Jaminan Sosial Keluarga serta Penyaluran Bantuan dan Pendampingan Jaminan Sosial Keluarga baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  12. Mengevaluasi program Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial secara berkala agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  13. Membuat laporan kegiatan Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan;
  14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.
- Susunan Organisasi Perlindungan, Jaminan Sosial Dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:
    - a. Seksi Perlindungan dan jaminan Sosial
    - b. Seksi Rehabilitasi Sosial

**c. Bidang Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin**

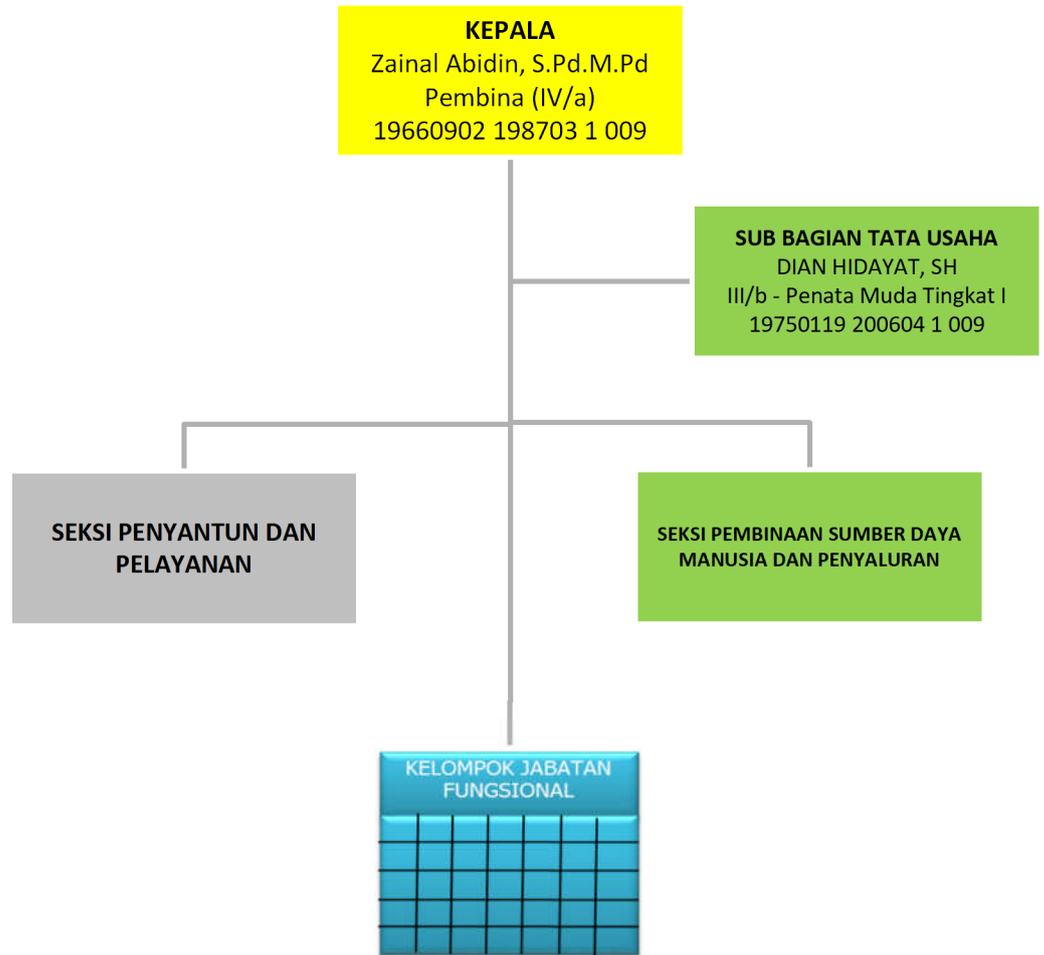


- Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :
  1. Merencanakan operasional program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan kebijakan Kepala Dinas agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
  2. Membagi tugas kepada Seksi Pemberdayaan Sosial dan Seksi Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan kewenangan masing-masing agar tugas terlaksana dengan baik;
  3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Sosial dan Seksi Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan kewenangan masing-masing agar tugas terlaksana dengan baik;
  4. Mengawasi pelaksanaan program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan tugas masing-masing agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
  5. Melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Sosial Perorangan, Pemberdayaan Sosial Keluarga, Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  6. Melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku;

7. Melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Sosial Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  8. Melaksanakan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  9. Melaksanakan kegiatan Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Fakir Miskin Perkotaan, Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara baik teknis maupun operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  10. Mengevaluasi program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin secara berkala agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  11. Membuat laporan kegiatan Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan;
  12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- Susunan Organisasi Bidang Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari:
    - a. Seksi Pemberdayaan Sosial
    - b. Seksi Penanganan Fakir Miskin

## **STRUKTUR ORGANISASI UPTD PANTI SOSIAL**

**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**



Gambar 2.5 Struktur Organisasi UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu Tanjung Selor

(Sumber : Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara No 21 Tahun 2016 Lampiran IV)



1. Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Marga Rahayu

Secara rinci tugas pokok dan fungsi UPTD pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara yang secara operasional dilaksanakan oleh masing-masing Panti yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- Tugas

Melaksanakan sebagian kewenangan yang diberikan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara dibidang pelayanan dan perawatan jasmani rohani lanjut usia terlantar.

- Fungsi

- ✓ Melaksanakan pelayanan lanjut usia terlantar
- ✓ Melaksanakan pemberian informasi usaha kesejahteraan sosial khususnya lanjut usia

- Susunan Organisasi PSTW Marga Rahayu terdiridari dari :

- a. Kepala
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Penyaluran
- d. Seksi Penyantunan dan Pelayanan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional



## b.2. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu unsur yang strategis dalam melaksanakan tugas-tugas Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara dan UPTD. Hingga sampai dengan 01 Desember jumlah sumber daya manusia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebanyak 36 Orang. Berdasarkan kualifikasi dapat dijelaskan sebagai tabel berikut:

### 1) Berdasarkan Pendidikan

Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial serta UPTD dengan latar belakang SD 0 Orang, SMP sebanyak 0 Orang, SLTA 8 Orang, D.III sebanyak 4 Orang, S.1 sebanyak 20 Orang, S.2 sebanyak 4 Orang.

Tabel 2. 1 Komposisi Pegawai Dinas Sosial berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Per 01 Desember 2018.

Gender	Pendidikan										Jumlah
	S D	SMP	SLTA	D. I	D.I I	D.III	D.IV	S. 1	S. 2	S. 3	
Pria			2			1		5	2		10
Wanita						2		11	1		14
Jumlah			2			3		16	3		24

Sumber: data kepegawaian Dinas Sosial Prov. Kaltara

Tabel 2. 2 Komposisi Pegawai UPTD Marga Rahayu berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Per 01 Desember 2018.

Gender	Pendidikan										Jumlah
	S D	SMP	SLTA	D. I	D.I I	D.III	D.IV	S. 1	S. 2	S. 3	
Pria			2					3	1		6
Wanita			4			1		1			6
Jumlah			6			1		4			12

Sumber: data kepegawaian UPTD Marga Rahayu Prov. Kaltara



## 2) Berdasarkan Eselon

Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial serta UPTD yang menempati jabatan Eselon II a sebanyak 1 Orang, Eselon III a sebanyak 4 orang, Eselon IV sebanyak 8 orang, dan Non Eselon sebanyak 24 orang.

Tabel 2.3. Komposisi Pegawai Dinas Sosial Berdasarkan Eselon Per 01 Desember 2018

Gender	Eselon					Non Eselon	Jumlah
	I	II	III	IV	Jumlah		
Pria		1	1	2	4	6	10
Wanita			2	4	6	8	14
Jumlah		1	3	6	10	14	24

Sumber: data kepegawaian dinsos Prov. Kaltara

Tabel 2.4. Komposisi Pegawai UPTD Marga Rahayu Berdasarkan Eselon Per 01 Desember 2018

Gender	Eselon					Non Eselon	Jumlah
	I	II	III	IV	Jumlah		
Pria			1	2	3	5	7
Wanita						5	5
Jumlah			1	2	3	10	12

Sumber: data kepegawaian UPTD Marga Rahayu Prov. Kaltara

## 3) Berdasarkan Golongan

Dari sejumlah 36 orang Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial serta UPTD yang menempati Golongan I sebanyak 0 orang, Golongan II sebanyak 10 orang, Golongan III sebanyak 21 orang, Golongan IV sebanyak 5 orang.

Tabel 2.5. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Per 01 Desember 2018

Gender	Golongan				Jumlah
	I	II	III	IV	
Pria	-	2	6	2	10
Wanita	-	2	10	2	14
Jumlah	-	4	16	4	24

Sumber: data kepegawaian Dinsos Prov. Kaltara



Tabel 2.6. Komposisi Pegawai UPTD Marga Rahayu Berdasarkan Golongan 01 Desember 2018

Gender	Golongan				Jumlah
	I	II	III	IV	
Pria	-	3	3	1	7
Wanita	-	3	2	-	5
Jumlah	-	6	5	1	12

Sumber: data kepegawaian UPTD Marga Rahayu Prov. Kaltara

#### 4) Pegawai Tidak Tetap

Pegawai Tidak tetap dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara dan UPTD berjumlah 23 orang, dengan latar belakang pendidikan S1 6 orang D III sebanyak 4 orang, SLTA sebanyak 12 orang, SMP sebanyak 1 orang dan SD sebanyak 1 orang.

Tabel 2. 7. Komposisi Tenaga Kerja Dinas Sosial Kontrak berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Per 01 Desember 2018.

Gender	Pendidikan								Jumlah	
	SD	SMP	SLTA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S.1		S.2
Pria			1			1		3		5
Wanita			1			-		4		5
Jumlah			2			1		7		10

Sumber: data kepegawaian Dinas Sosial Prov. Kaltara

Tabel 2. 8. Komposisi Tenaga Kerja Kontrak UPTD Marga Rahayu berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Per 01 Desember 2018.

Gender	Pendidikan								Jumlah	
	SD	SM P	SLTA	D. I	D.I I	D.III	D.IV	S. 1		S. 2
Pria	-	1	2	-	-	2	-	2	-	7
Wanita	1	-	3	-	-	1	-	1	-	6
Jumlah	1	1	5	-	-	3	-	3	-	13

Sumber: data kepegawaian UPTD Marga Rahayu Prov. Kaltara



### b.3 Sarana dan Prasarana SKPD

#### a. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas sosial Provinsi Kalimantan Utara meliputi peralatan kantor yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9. Daftar aset Dinas Sosial per tanggal 31 Desember 2018.

No	Uraian/ Barang	Merk	Tahun Perolehan	Jml	Perolehan barang	Status barang	Kondisi barang
1	Mesin Ketik	Olimpia	2018	1	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
2	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Filling Kabinet)	-	2018	2	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
3	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Lemari Arsip)	-	2018	4	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
4	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Brangkas)	Kafele	2018	1	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
5	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Lemari Kayu)	-	2018	5	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
6	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Rak Koran)	-	2018	1	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
7	Alat Kantor Lainnya (Alat Penghancur Kertas)	Dahle	2018	2	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
8	Alat Kantor Lainnya (GPS)	Garmin	2018	1	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
9	Alat Pendingin (Lemari Es)	Samsung	2018	1	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
10	Alat Pendingin (AC)	LG	2018	1	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
11	Alat Rumah Tangga Lainnya (Televisi)	Samsung	2018	2	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
12	Alat Rumah Tangga Lainnya (Sarana Akses Bagi Disabilitas/ Pagar)	-	2018	1	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
13	Komputer PC	HP	2018	1	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
14	Laptop	HP	2018	8	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
15	Printer	Epson	2018	4	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
16	Meja Kerja	-	2018	15	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik



Tahun 2018

17	Meja Pejabat Eselon 2	Frontline	2018	1	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
18	Meja Rapat	-	2018	1	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
19	Kursi Kerja	-	2018	17	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
20	Kursi Tamu	-	2018	1	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
21	Peralatan Studio Visual (Kamera)	Canon & Fujifilm	2018	2	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
22	Alat Komunikasi (Telephone)	Panasonic	2018	1	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
23	Software (Website)	-	2018	1	Pembelian APBD 2018	Aset Dinas Sosial	Baik
24	AC Central	Polytron & Gree	2018	2	Dinas Kelautan dan Perikanan	Aset Dinas Sosial	Baik
25	AC Split	Samsung	2018	4	Dinas Kelautan dan Perikanan	Aset Dinas Sosial	Baik
26	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Lemari Arsip)	-	2017	3	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
27	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Filling Kabinet)	-	2017	2	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
28	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Rak Piring)	-	2017	1	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
29	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dispenser)	Sanken	2017	1	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
30	Pengadaan Personal Komputer (Komputer)	Asus	2017	1	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
		Asus	2017	4	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
31	Pengadaan Personal Komputer Laptop	Asus	2017	5	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
32	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (CCTV)		2017	1	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
33	Peralatan Perlengkapan Kantor (Printer)	EPSON	2017	2	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
		EPSON	2017	1	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
34	Peralatan Perlengkapan Kantor (Wireless)	YTS	2017	1	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
35	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Brankas)	Sentry Safe	2017	1	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
36	Pengadaan Alat Studio (Microfon)		2017	1	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
37	Pengadaan Alat Studio (Proyektor dan layar)	Epson	2017	1	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
38	Scanner	EPSON	2017	1	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik
39	Gorden		2017	1	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas	Baik
40	Mobil Inova (pembagian dari Biro Umum)	Inova	2017	1	Pembagian dari Biro Umum	Pinjam Pakai	Baik
41	Mobil Operasional	Hilux	2017	1	Pembelian APBD 2017	Aset Dinas Sosial	Baik



42	Meja Kayu	-	2017	5	Dinas PU-PR	Pinjam Pakai	Rusak Ringan
43	Kursi Kayu	-	2017	7	Dinas PU-PR	Pinjam Pakai	Rusak Ringan
44	Meja Kerja Biro	Pro Design	2017	1	Biro Kesra	Pinjam Pakai	Baik
45	Meja Kerja 1/2 Biro	Activ	2017	3	Biro Kesra	Pinjam Pakai	Baik
46	Meja Kerja 1/2 Biro	-	2017	8	Biro Kesra	Pinjam Pakai	2 Rusak Ringan
47	Kursi Kerja	Chitose	2017	6	Biro Kesra	Pinjam Pakai	Baik
48	Kursi Kerja	Malvin	2017	3	Biro Kesra	Pinjam Pakai	Baik
49	Mobil Dapur Lapangan	Mitsubishi	2015	1	Kemsos R1	Pinjam Pakai	Baik
50	Mobil Rescue	Mitsubishi	2015	1	Kemsos R1	Pinjam Pakai	Baik
51	Truk	Mitsubishi	2015	1	Kemsos R1	Pinjam Pakai	Baik
52	Mobil Tangki Air	Mitsubishi	2015	1	Kemsos R1	Pinjam Pakai	Baik
53	Motor Lapangan	Kawasaki	2015	2	Kemsos R1	Pinjam Pakai	Baik

*Sumber: Laporan Pengurus Barang Dinsos bulan Desember Tahun 2018*

#### **b. UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu**

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas UPTD Marga Rahayu :

- LAHAN

1. Luas lahan : 10.800 m<sup>2</sup>
2. Sudah Sertifikasi : 4.800 m<sup>2</sup>
3. Masih Hak Guna Pakai : 6.000 m<sup>2</sup>
4. Kondisi Lahan : Terletak di daerah dataran tinggi, bebas banjir dengan struktur tanah datar dan bukit
5. Lahan Yang Digunakan : 4.265,5 m<sup>2</sup>
6. Yang Belum Digunakan : 6.534,5 m<sup>2</sup>
7. Alamat : Jalan Kakak Tua No.41 RT. 39 RW. 14 Tanjung Selor Hilir

- BANGUNAN

Tabel 2.10. Daftar Bangunan UPTD 2018.



No.	Bentuk Bangunan	Ukuran	Jumlah
1.	Wisma Tempat Tinggal Lanjut usia terlantar Kantor	120 m <sup>2</sup>	9 Unit
2.	Musholla	188 m <sup>2</sup>	1 Unit
3.	Dapur Umum	100 m <sup>2</sup>	1 Unit
4.	Gudang	120 m <sup>2</sup>	1 Unit
5.	Wisma Khusus/Kasih	75 m <sup>2</sup>	1 Unit
6.	Sayang	160 m <sup>2</sup>	1 Unit
7.	A u l a	200 m <sup>2</sup>	1 Unit
8.	Poliklinik/Ruang	80 m <sup>2</sup>	1 Unit
9.	Keterampilan	24 m <sup>2</sup>	2 Unit
10.	Garasi	36 m <sup>2</sup>	2 Unit
11.	Rumah Petugas Tipe 36	50 m <sup>2</sup>	1 Unit
12.	Rumah Petugas Tipe 50	70 m <sup>2</sup>	1 Unit
13.	Rumah Petugas Tipe Kopel	4 m <sup>2</sup>	1 Unit
14.	Pos Penjagaan	-	200 Meter
15.	Pagar Tembok dan Pipa Besi	Lebar 1,5 M	335 Meter
Jumlah Bangunan Keseluruhannya			: 23 Unit

Tabel 2.11. Daftar Aset Peralatan Dan Mesin UPTD 2018

No	Uraian/ Barang	Merk	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Kondisi barang
1	Kendaraan Roda 4	Kijang Inova	Aset dari Kaltim	1	Baik
2	Kendaraan Roda 4	Mitsubishi L300	Aset dari Kaltim	1	Rusak Berat
3	Kendaraan Roda 4	Ambulance Hiluc	Aset dari Kaltim	1	Rusak Ringan
2	Kendaraan Roda 2	Yamaha Jupiter	Aset dari Kaltim	2	Baik
3	CCTV	Nathan's	2018	1	Baik
4	Sound Sistem	Auder	2018	1	Baik
5	Penghancur Kertas	Secure	2018	1	Baik
6	Laptop	HP	2018	2	Baik
7	Printer	Epson	2018	2	Baik
8	Kursi Makan Lansia Kayu	-	2018	1	Baik



9	Meja Makan Lansia Kayu	-	2018	1	Baik
10	Lemari Arsip	Emporium	2018	2	Baik
11	Pemanas Air	Ariston	2018	2	Baik
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (kompor Gas)	Butterfly	2015	2	Baik
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dispenser)	Miyako	2015	2	Baik
14	Peralatan perlengkapan kantor (Mesin Absensi)	Fingerspot Premier	2016	1	Baik
15	Peralatan Perlengkapan Kantor (Scanner)	Canoscan	2016	1	Baik
16	Pengadaan Personal Komputer (Laptop)	Asus	2016	2	Baik
		Toshiba	2016	1	Baik
17	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya ( Mimbar/Podium)		2016	1	Baik
18	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Spring Bad)	Central Deluxe	2017	33	Baik
19	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Spray dan Bantal)	Lokal	2017	33	Baik
		Central	2017	33	Baik
20	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Ambal dan Lukisan)		2017	3	Baik
21		lokal	2017	5	Baik
22	Tanah bangunan kantor pemerintahan		1986	1	Baik
23			1996	1	Baik
24	Bangunan Gedung Permanen		1999	1	Baik
25	Bangunan Gedung Tempat Ibadah		2010	1	Baik
26	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		1999	1	Baik
27	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan		1999	1	Baik
28	Bangunan Gedung Tempat Pos Jaga		2013	1	Baik
29	Bangunan Gedung Tempat kerja/ Kantor		2009	1	Baik

Sumber: data pengurus barang UPTD Panti Sosial Marga Rahayu Prov. Kaltara.



c. **Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD**

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah. Standar Operasional Prosedur merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan SOP adalah menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan *good governance*.

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Sosial dalam menyelenggarakan tugas pekerjaan di bidang kesejahteraan sosial disusun SOP Dinas Sosial sebagai berikut:

**1) Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian**

- a) Surat Masuk
- b) Kenaikan Pangkat
- c) Kenaikan Gaji Berkala
- d) Permohonan Pengajuan Cuti
- e) Ijin Perceraian
- f) Penghargaan Satya Lencana
- g) Penerbitan SPT dan SPPD
- h) Pensiun Pegawai
- i) Usulan Ujian Dinas
- j) Pengisian SKP



**2) Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan**

- a) Pengajuan SPP dan SPM Uang Persediaan (GU)
- b) Pengajuan SPP dan SPM LS (Pihak Kegita / Bendahara)
- c) Pembuatan SPJ
- d) Pengajuan SPP dan SPM Gaji

**3) Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan**

- a) Penyusunan Laporan Realisasi Program
- b) Penyusunan LAKIP
- c) Penyusunan Profil Data PMKS
- d) Penyusunan Profil Data PSKS
- e) Kasubag Perencanaan dan Keuangan Menyimpan Arsip Usulan RKA

**4) Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial**

- a) Pemulangan Orang Telantar
- b) Ijin Pendirian Yayasan Organisasi Sosial
- c) Pemberian Bantuan Tanggap Darurat

**5) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin**

- a) Permohonan Rekomendasi Ijin UGB
- b) Verifikasi Proposal KUBE
- c) Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Pendirian Yayasan
- d) Penerbitan Surat Rekomendasi LKS Proposal Bansos
- e) Penerbitan Surat Rekomendasi Operasional LKS



## BAB III

### KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

#### a. Visi dan Misi

Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara menjadi Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021. Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021:

**“Berpadu Dalam Kemajemukan Untuk Mewujudkan Kaltara 2020 Yang Mandiri, Aman dan Damai Dengan Didukung Pemerintahan Yang bersih dan Berwibawa”.**

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021, dirumuskan 3 (tiga) Misi sebagai berikut :

1. Mandiri
  - Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  - Meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan.
  - Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas.
2. Aman dan Damai
  - Menjaga kedaulatan negara dan NKRI.
  - Membangun daerah perbatasan yang aman.
  - Memberantas berbagai transaksi dan bisnis ilegal.
3. Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa
  - Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
  - mewujudkan pelayanan publik yang prima.



- Meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, perizinan dan kependudukan yang bebas suap dan gratifikasi.

Setelah mengidentifikasi visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara berketetapan untuk mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan misi ke-1 yaitu Mandiri. Untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri, tiga penjabaran misi yang harus dilakukan antara lain: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan, dan meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas.

Dalam mengupayakan kemandirian daerah maka Provinsi Kalimantan Utara harus memiliki masyarakat yang sejahtera. Dengan kesejahteraan yang memadai diharapkan tidak terlalu tergantung pada daerah atau wilayah lainnya sehingga bisa mandiri. Perwujudan masyarakat yang sejahtera akan diarahkan untuk mengurangi kondisi berkurangnya kemiskinan masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan pengurangan kemiskinan akan lebih nyata dan terasa peningkatan kesejahteraan masyarakat disamping berbagai upaya pendukung lainnya.

Pengurangan angka kemiskinan sebagai penanda berkurangnya kondisi kemiskinan masyarakat berpenghasilan rendah perlu diawali dengan upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat, serta upaya peningkatan kelompok rentan miskin.



**b. Strategi dan Arah Kebijakan**

Mengacu kepada Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan, maka strategi pembangunan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2016-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatnya kemandirian PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya	a. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Bagi PMKS	Persentase PMKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Peningkatan pelatihan dan pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas dan ketrampilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Meningkatkan Kapasitas dan keterampilan penduduk miskin dan rentan melalui peningkatan kualitas pendampingan usaha ekonomi produktif</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Penyempurnaan pengukuran kemiskinan yang menyangkut kriteria, standarisasi dan sistem pengelolaan data terpadu</li> </ul>					
Persentase PMKS yg mendapat bantuan sosial untuk memenuhi hak dasar dan inklusivitasnya		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu, rentan, penyandang disabilitas, PMKS yang tidak potensial serta kelompok marjinal lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Meningkatkan kualitas dan pemerataan jumlah sarana sosial</li> <li>· Meningkatkan kualitas pelayanan dan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial</li> </ul>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Meningkatkan penjangkauan pelayanan dasar bagi penduduk kurang mampu, rentan, penyandang disabilitas, PMKS yang tidak potensial serta kelompok marjinal lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Meningkatkan pemberdayaan sosial dan kapasitas hidup bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial</li> <li>· Meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan para penyandang cacat dan trauma</li> <li>· Meningkatkan kualitas penanganan dan pembinaan anak terlantar</li> </ul>		



				<ul style="list-style-type: none"> <li>· Meningkatkan kualitas penanganan dan pembinaan eks. Penyakit Sosial</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>· Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana di provinsi maupun kab/kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Memberikan diklat dan pelatihan bagi pemerintah, lembaga dan masyarakat dalam penanganan bencana alam dan bencana sosial</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>· Peningkatan Kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik ke daerah bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Meningkatkan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial</li> </ul>
		Meningkatnya peran lembaga/masyarakat dalam menangani permasalahan sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Prosentase Lembaga Sosial/PSKS yang sudah mampu memberikan pelayanan sesuai SPM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Meningkatkan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>· Penataan asistensi sosial terpadu berbasis keluarga dan siklus hidup melalui program keluarga produktif dan sejahtera yang mencakup antara lain bantuan tunai bersyarat dan/atau sementara pangan bernutrisi, peningkatan kapasitas pengasuhan dan usaha keluarga, pengembangan penyaluran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Memberikan pelatihan/diklat bagi PSKS</li> </ul>



**BAB IV**  
**PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL**  
**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**A. Alokasi Anggaran SKPD**

Sumber dana Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara berasal dari APBD dan APBN baik dana dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Adapun rincian anggaran dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4.1. Alokasi APBD Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara T.A 2018

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Pagu Anggaran	
		Murni	Perubahan
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2,816,203,314.00</b>	<b>2,602,192,314.00</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16,000,000.00	12,000,000.00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan listrik	107,000,000.00	66,000,000.00
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	200,540,000.00	174,540,000.00
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1,192,050,000.00	985,000,000.00
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	32,200,000.00	26,350,000.00
6	penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	10,000,000.00	8,000,000.00
7	Penyediaan alat tulis kantor	83,000,000.00	63,000,000.00
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	80,523,314.00	70,523,314.00
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10,000,000.00	8,000,000.00
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	375,750,000.00	370,797,000.00
11	Penyediaan peralatan rumah tangga	20,000,000.00	14,500,000.00
12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	23,000,000.00	14,000,000.00
13	Penyediaan makanan dan minuman	105,000,000.00	60,000,000.00
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	261,800,000.00	340,340,000.00
15	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah	299,340,000.00	389,142,000.00
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>550,000,000.00</b>	<b>484,000,000.00</b>
16	penyewaan rumah / gedung / gudang parkir kantor dinas	550,000,000.00	484,000,000.00
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>55,460,000.00</b>	<b>-</b>
17	Pendidikan dan pelatihan formal	55,460,000.00	-
<b>IV</b>	<b>Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya</b>	<b>770,559,200.00</b>	<b>807,289,200.00</b>
18	Bantuan Keluarga Bersama (KUBE) Bagi Keluarga Miskin	662,160,000.00	678,890,000.00
19	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	108,399,200.00	128,399,200.00
<b>V</b>	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>1,403,348,100.00</b>	<b>1,351,788,100.00</b>
20	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	57,400,000.00	57,740,000.00
21	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal	233,756,000.00	186,256,000.00
22	Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	430,572,000.00	380,572,000.00
23	Perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan penanganan masalah - masalah strategis yang menyangkut	176,032,000.00	117,740,000.00
24	tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	454,307,600.00	558,539,600,000.00
25	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	50,940,500.00	50,940,500.00
<b>VI</b>	<b>Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan trauma</b>	<b>189,280,000.00</b>	<b>139,280,000.00</b>
26	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	189,280,000.00	139,280,000.00
<b>VII</b>	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>843,480,000.00</b>	<b>880,468,000.00</b>
27	Peningkatan Peran aktif masyarakat dan dunia usaha	152,600,000.00	106,929,000.00
28	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan sosial Masyarakat	143,600,000.00	109,868,100.00
29	Kegiatan Pembinaan Lembaga RTPC	75,400,000.00	70,400,000.00
30	Pemberdayaan Karang Taruna	247,600,000.00	220,600,000.00
31	Pendataan dan Validasi Data PMKS dan PSKS*	224,280,000.00	372,670,900.00
<b>Total</b>		<b>6,628,330,614.00</b>	<b>6,265,017,614.00</b>

*Sumber: DPAP Dinsos Tahun 2018*



Tabel 4.2. Alokasi APBN Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara TA 2018

KODE SATKER	NAMA SATKER	PAGU AGGARAN (Rp)	Nama Penanggungjawab Kegiatan
1	2	3	4
DINAS SOSIAL	PROVINSI KALIMANTAN UTARA	9.100.110.000,00	
417729	SEKRETARIAT JENDERAL	171.616.000,00	Rakhmatiah, SE
2227	Perencanaan dan Penganggaran	171.616.000,00	
417730	DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.318.982.000,00	Ipai Lawai, S.Sos
2236	Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	202.451.000,00	
2239	Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat	871.189.000,00	
2240	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	145.342.000,00	
5872	Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial	100.000.000,00	
417731	DITJEN REHABILITASI SOSIAL	1.846.243.000,00	Martina, SE
2242	Rehabilitasi Sosial Korban penyalahgunaan Napza	95.132.000,00	
2243	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	614.500.000,00	
2244	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang	171.500.000,00	
2245	Rehabilitasi Sosial Anak	526.411.000,00	
2246	Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	438.700.000,00	
417732	DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.706.698.000,00	Matus Kasik
2248	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	1.525.052.000,00	
2249	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	190.866.000,00	
2251	Jaminan Sosial Keluarga	990.780.000,00	
417787	DITJEN PENANGANAN FAKIR MISKIN	3.056.571.000,00	Anton Mantirri R, SKM
5873	Penanganan Fakir Miskin Pedesaan	681.080.000,00	
5874	Penanganan Fakir Miskin Perkotaan	1.488.775.000,00	
5875	Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara	886.716.000,00	
	Total	9.100.110.000,00	

Sumber: DIPA Dinsos Tahun 2018

## B. Realisasi Program dan Kegiatan

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan sosial di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Adapun realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2018 yang tertera pada Tabel di bawah ini.



Tabel 4.3 Realisasi Anggaran APBD dan APBD Perubahan Dinsos Prov. Kaltara Per 31 Desember 2018

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI					SISA ANGGARAN (Rp.)	PPTK & BENDAHARA
			FISIK		KEUANGAN				
			%	TTB (%)	Rp.	%	TTB (%)		
<b>DINAS SOSIAL</b>	<b>9.798.731.858</b>	<b>100,00</b>	<b>88,44</b>	<b>88,44</b>	<b>7.689.185.524</b>	<b>78,47</b>	<b>78,47</b>	<b>2.109.546.334</b>	
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>3.533.714.244</b>	<b>36,06</b>	<b>100,00</b>	<b>36,06</b>	<b>3.014.373.997</b>	<b>85,30</b>	<b>30,76</b>	<b>519.340.247</b>	
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>6.265.017.614</b>	<b>63,94</b>	<b>81,92</b>	<b>52,38</b>	<b>4.674.811.527</b>	<b>74,62</b>	<b>47,71</b>	<b>1.590.206.087</b>	
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2.602.192.314</b>	<b>26,56</b>	<b>96,06</b>	<b>25,51</b>	<b>2.275.244.165</b>	<b>87,44</b>	<b>23,22</b>	<b>326.948.149</b>	Hj. Ambalial Balisah, SE
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	0,12	100,00	0,12	9.627.500	80,23	0,10	2.372.500	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan listrik	66.000.000	0,67	100,00	0,67	55.515.781	84,11	0,57	10.484.219	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	174.540.000	1,78	100,00	1,78	123.900.878	70,99	1,26	50.639.122	
Penyediaan jasa administrasi keuangan	985.000.000	10,05	90,84	9,13	836.785.000	84,95	8,54	148.215.000	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	26.350.000	0,27	100,00	0,27	26.272.200	99,70	0,27	77.800	
penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	8.000.000	0,08	100,00	0,08	7.836.000	97,95	0,08	164.000	
Penyediaan alat tulis kantor	63.000.000	0,64	100,00	0,64	61.488.700	97,60	0,63	1.511.300	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	70.523.314	0,72	100,00	0,72	42.521.250	60,29	0,43	28.002.064	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.000.000	0,08	100,00	0,08	5.762.000	72,03	0,06	2.238.000	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	370.797.000	3,78	98,38	3,72	361.479.487	97,49	3,69	9.317.513	
Penyediaan peralatan rumah tangga	14.500.000	0,15	100,00	0,15	13.538.000	93,37	0,14	962.000	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	14.000.000	0,14	100,00	0,14	11.300.000	80,71	0,12	2.700.000	
Penyediaan makanan dan minuman	60.000.000	0,61	89,58	0,55	34.148.800	56,91	0,35	25.851.200	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	340.340.000	3,47	100,00	3,47	308.605.616	90,68	3,15	31.734.384	
Rapat-rapat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah	389.142.000	3,97	100,00	3,97	376.462.953	96,74	3,84	12.679.047	
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>484.000.000</b>	<b>4,94</b>	<b>100,00</b>	<b>4,94</b>	<b>484.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4,94</b>	<b>0</b>	Hj. Ambalial Balisah, SE
penyewaan rumah / gedung / gudang parkir kantor dinas	484.000.000	4,94	100,00	4,94	484.000.000	100,00	4,94	0	
<b>Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan per</b>	<b>807.289.200</b>	<b>8,24</b>	<b>81,05</b>	<b>6,68</b>	<b>577.320.348</b>	<b>71,51</b>	<b>5,89</b>	<b>229.968.852</b>	Dra. Hj. Arsanah
Bantuan Keluarga Bersama (KUBE) Bagi Keluarga Miskin	678.890.000	6,93	77,46	5,37	452.258.315	66,62	4,62	226.631.685	
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	128.399.200	1,31	100,00	1,31	125.062.033	97,40	1,28	3.337.167	



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara  
Tahun 2018

<b>1.06 . . .1.06.01.01 . 16</b>	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>1.351.788.100</b>	<b>13,80</b>	<b>45,66</b>	<b>6,30</b>	<b>565.485.150</b>	<b>41,83</b>	<b>5,77</b>	<b>786.302.950</b>	<b>Suriansyah, ST</b>
1.06 . . .1.06.01.01 . 16 . 02	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdag	57.740.000	0,59	28,22	0,17	13.182.000	22,83	0,13	44.558.000	
1.06 . . .1.06.01.01 . 16 . 04	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar terma	186.256.000	1,90	0,00	0,00	0	0,00	0,00	186.256.000	
1.06 . . .1.06.01.01 . 16 . 07	Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejaht	380.572.000	3,88	27,54	1,07	95.964.000	25,22	0,98	284.608.000	
1.06 . . .1.06.01.01 . 16 . 09	Perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penangg	117.740.000	1,20	84,25	1,01	92.515.150	78,58	0,94	25.224.850	
1.06 . . .1.06.01.01 . 16 . 10	Penanganan masalah - masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat d	558.539.600	5,70	63,09	3,60	336.100.000	60,17	3,43	222.439.600	
1.06 . . .1.06.01.01 . 16 . 11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	50.940.500	0,52	87,49	0,45	27.724.000	54,42	0,28	23.216.500	
<b>1.06 . . .1.06.01.01 . 18</b>	<b>Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan trauma</b>	<b>139.280.000</b>	<b>1,42</b>	<b>18,15</b>	<b>0,26</b>	<b>19.928.400</b>	<b>14,31</b>	<b>0,20</b>	<b>119.351.600</b>	<b>Suriansyah, ST</b>
1.06 . . .1.06.01.01 . 18 . 03	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	139.280.000	1,42	18,15	0,26	19.928.400	14,31	0,20	119.351.600	
<b>1.06 . . .1.06.01.01 . 21</b>	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>880.468.000</b>	<b>8,99</b>	<b>96,76</b>	<b>8,69</b>	<b>752.833.464</b>	<b>85,50</b>	<b>7,68</b>	<b>127.634.536</b>	<b>Dra. Hj. Arsanah</b>
1.06 . . .1.06.01.01 . 21 . 01	Peningkatan Peran aktif masyarakat dan dunia usaha	106.929.000	1,09	100,00	1,09	106.929.000	100,00	1,09	0	
1.06 . . .1.06.01.01 . 21 . 03	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan sosial Masyarakat	109.868.100	1,12	100,00	1,12	109.868.100	100,00	1,12	0	
1.06 . . .1.06.01.01 . 21 . 06	Kegiatan Pembinaan Lembaga RTPC	70.400.000	0,72	95,74	0,69	31.862.900	45,26	0,33	38.537.100	
1.06 . . .1.06.01.01 . 21 . 11	Pemberdayaan Karang Taruna	372.670.900	3,80	100,00	3,80	320.613.464	86,03	3,27	52.057.436	
1.06 . . .1.06.01.01 . 21 . 15	Pendataan dan Validasi Data PMKS dan PSKS*	220.600.000	2,25	88,42	1,99	183.560.000	83,21	1,87	37.040.000	
<b>JUMLAH REALISASI S.D DESEMBER</b>		<b>9.798.731.858</b>	<b>100,00</b>	<b>88,44</b>	<b>88,44</b>	<b>7.689.185.524</b>	<b>78,47</b>	<b>78,47</b>	<b>2.109.546.334</b>	

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Dinas Sosial Prov. Kaltara Per 31 Desember 2018.



Tabel 4.4. Realisasi Anggaran APBD dan APBD Perubahan UPTD PSTWMR Prov. Kaltara Per 31 Desember

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI					SISA ANGGARAN (Rp.)	PPTK
			FISIK		KEUANGAN				
			%	TTB (%)	Rp.	%	TTB (%)		
<b>UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU</b>	<b>3.479.574.238</b>	<b>100,00</b>	<b>99,21</b>	<b>99,21</b>	<b>2.878.686.902</b>	<b>82,73</b>	<b>82,73</b>	<b>600.887.336</b>	<b>Suryani S</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.126.259.000</b>	<b>32,37</b>	<b>100,00</b>	<b>32,37</b>	<b>876.058.400</b>	<b>77,78</b>	<b>25,18</b>	<b>250.200.600</b>	
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>2.353.315.238</b>	<b>67,63</b>	<b>98,83</b>	<b>66,84</b>	<b>2.002.628.502</b>	<b>85,10</b>	<b>57,55</b>	<b>350.686.736</b>	
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2.076.990.000</b>	<b>59,69</b>	<b>99,19</b>	<b>59,21</b>	<b>1.769.555.202</b>	<b>85,20</b>	<b>50,86</b>	<b>307.434.798</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	0,09	87,00	0,08	2.550.000	85,00	0,07	450.000	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan listrik	185.600.000	5,33	100,00	5,33	140.443.163	75,67	4,04	45.156.837	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.500.000	0,10	100,00	0,10	3.249.600	92,85	0,09	250.400	
Penyediaan jasa administrasi keuangan	640.550.000	18,41	99,87	18,38	633.404.240	98,88	18,20	7.145.760	
penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	11.600.000	0,33	100,00	0,33	8.895.000	76,68	0,26	2.705.000	
Penyediaan alat tulis kantor	30.000.000	0,86	100,00	0,86	29.955.850	99,85	0,86	44.150	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	29.800.000	0,86	64,26	0,55	16.106.250	54,05	0,46	13.693.750	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.500.000	0,36	100,00	0,36	12.188.000	97,50	0,35	312.000	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	66.500.000	1,91	100,00	1,91	66.176.538	99,51	1,90	323.462	
Penyediaan peralatan rumah tangga	98.000.000	2,82	94,90	2,67	92.703.500	94,60	2,66	5.296.500	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.500.000	0,22	100,00	0,22	4.860.000	64,80	0,14	2.640.000	
Penyediaan makanan dan minuman	853.000.000	24,51	100,00	24,51	628.539.300	73,69	18,06	224.460.700	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	83.440.000	2,40	100,00	2,40	78.858.761	94,51	2,27	4.581.239	
Rapat-rapat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah	52.000.000	1,49	100,00	1,49	51.625.000	99,28	1,48	375.000	
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>164.685.238</b>	<b>4,73</b>	<b>100,00</b>	<b>4,73</b>	<b>144.234.800</b>	<b>87,58</b>	<b>4,15</b>	<b>20.450.438</b>	
Pengadaan mebeleur	35.000.000	1,01	100,00	1,01	32.850.000	93,86	0,94	2.150.000	
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	38.050.000	1,09	100,00	1,09	37.880.800	99,56	1,09	169.200	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	28.575.238	0,82	100,00	0,82	21.591.000	75,56	0,62	6.984.238	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	63.060.000	1,81	100,00	1,81	51.913.000	82,32	1,49	11.147.000	
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0,29</b>	<b>13,00</b>	<b>0,04</b>	<b>1.300.000</b>	<b>13,00</b>	<b>0,04</b>	<b>8.700.000</b>	
Pendidikan dan pelatihan formal	10.000.000	0,29	13,00	0,04	1.300.000	13,00	0,04	8.700.000	
<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>101.640.000</b>	<b>2,92</b>	<b>98,03</b>	<b>2,86</b>	<b>87.538.500</b>	<b>86,13</b>	<b>2,52</b>	<b>14.101.500</b>	
Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejah	101.640.000	2,92	98,03	2,86	87.538.500	86,13	2,52	14.101.500	
<b>JUMLAH REALISASI S.D DESEMBER</b>	<b>3.479.574.238</b>	<b>100,00</b>	<b>99,21</b>	<b>99,21</b>	<b>2.878.686.902</b>	<b>82,73</b>	<b>82,73</b>	<b>600.887.336</b>	

2018

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik UPTD PSTWMR Prov. Kaltara Per 31 Desember 2018



Tabel 4.5. Realisasi Anggaran APBN Per 31 Desember 2018

No	KODE SATKER	NAMA SATKER	PAGU ANGGARAN (Rp)	BOBOT (%)	Realiasi Fisik		Realisasi Keuangan			SISA DANA (Rp)	Nama Penanggungjawab Kegiatan
					Fisik (%)	Tertimbang (%)	Keuangan (100 %)	Keuangan (%)	Tertimbang (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA</b>			<b>9,100,110,000</b>	<b>104.15</b>	<b>88.38</b>	<b>92.05</b>	<b>7,489,846,267.00</b>	<b>82.31</b>	<b>85.75</b>	<b>1,610,263,733.00</b>	
I	417729	SEKRETARIAT JENDERAL	171,616,000	1.79	97.36	1.74	167,082,000	97.36	1.74	4,534,000.00	Hj. Rakhmatia, SE
1	2227	Program Dukungan Manajemen Dana Dekonsentrasi/Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial	171,616,000	1.79	97.36	1.74	167,082,000	97.36	1.74	4,534,000.00	
II	417730	DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL	1,318,982,000	18.74	99.09	130.93	1,097,715,880	83.22	15.60	221,266,120.00	Ipai Lawai, S.Sos.
2	2236	Kepahlawanan, Keperintisan, Kesefakawanan dan Restorasi Sosial	202,451,000	15.35	100.00	15.35	188,428,000	93.07	14.29	14,023,000.00	
3	2239	Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat	871,189,000	15.35	100.00	15.35	714,478,000	82.01	12.59	156,711,000.00	
4	2240	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	145,342,000	66.05	95.19	62.88	110,300,880	75.89	50.13	35,041,120.00	
5	5872	Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial	100,000,000	39.32	95.00	37.36	84,509,000	84.51	33.23	15,491,000.00	
III	35003	DITJEN REHABILITASI SOSIAL	1,846,243,000	20.29	83.88	17.02	1,478,190,320	80.06	16.24	368,052,680.00	Martina, S.E
6	2243	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas	614,500,000	6.75	76.38	5.16	417,079,318	67.87	4.58	197,420,682.00	
7	2246	Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	438,700,000	4.82	91.05	4.39	406,897,000	92.75	4.47	31,803,000.00	
8	2245	Rehabilitasi Sosial Anak	526,411,000	5.78	100.00	5.78	516,603,000	98.14	5.68	9,808,000.00	
9	2242	Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza	95,132,000	1.05	100.00	1.05	86,890,002	91.34	0.95	8,241,998.00	
10	2244	Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	171,500,000	1.88	34.00	0.64	50,721,000	29.57	0.56	120,779,000.00	
IV	35003	DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2,706,698,000	29.74	84.86	25.24	2,159,688,217	79.79	23.73	547,009,783.00	Matus Kasik
11	2248	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	1,525,052,000	16.76	82.00	13.74	1,186,753,417	77.82	13.04	338,298,583.00	
12	2249	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	190,866,000	2.10	81.00	1.70	147,821,000	77.45	1.62	43,045,000.00	
13	2251	Jaminan Sosial Keluarga	990,780,000	10.89	90.00	9.80	825,113,800	83.28	9.07	165,666,200.00	
V	418987	DITJEN PENANGANAN FAKIR MISKIN	3,056,571,000	33.59	89.07	29.92	2,587,169,850	84.64	28.43	469,401,150.00	Anton Mantirri, S.KM, MM
14	5873	Penanganan Fakir Miskin di Perdesaan	681,080,000	7.48	91.75	6.87	604,466,200	88.75	6.64	76,613,800.00	
15	5874	Penanganan Fakir Miskin Perkotaan	1,488,775,000	16.36	89.42	14.63	1,269,667,150	85.28	13.95	219,107,850.00	
16	5875	Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Perbatasan antar Negara	886,716,000	9.74	86.45	8.42	713,036,500	80.41	7.84	173,679,500.00	
Jumlah			9,100,110,000	104.15	88.38	92.05	7,489,846,267	82.31	85.72	1,610,263,733.00	



*Sumber : Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Dinas Sosial Prov. Kaltara Per 31 Desember 2018.*



**Adapun rincian kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:**

**1) Bidang Sekretariat**

**a. Kegiatan Rutin**

1. Mengadministrasikan surat masuk dan surat keluar berdasarkan ketentuan yang ada yaitu Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. Jumlah surat masuk s.d Tanggal 31 Desember 2018 sebanyak 1.298 dan surat keluar sebanyak 827 surat.
2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2018.
3. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) TA 2018.
4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Sosial TA 2019.
5. Menginput Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas Sosial TA 2019.
6. Penerbitan SK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2018.
7. Penerbitan SK Pejabat Penatausahaan Keuangan Tahun Anggaran 2018.
8. Penerbitan SK Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018.
9. Penerbitan SK Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2018.
10. Penyusunan Rencana Strategik (Renstra) Tahun 2016-2021.
11. Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
12. Mengakomodir SKP ASN di lingkungan Dinas Sosial Prov. Kaltara.
13. Melakukan pemberkasan data-data Kepegawaian di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara.
14. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Tahun 2018 mengacu Permendagri Nomor 7 tahun 2006 tentang Standart dan Prasarana Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah.
15. Melaksanakan pengadaan sarana kerja yang mendesak disiapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas meliputi ATK, bahan dan alat kebersihan, komponen instalasi penerangan gedung kantor dan sarana lainnya.



16. Melakukan administrasi dan pengelolaan barang yaitu pencatatan dan pendistribusian barang, berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
17. Mengadakan rapat rutin setiap bulannya.
18. Melaksanakan perjalanan dinas dalam dan luar daerah sebanyak 479 kali baik dalam daerah maupun luar daerah.

## 2) Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial

### 1. Kegiatan APBD

#### I. Upaya-upaya Penanggulangan Kemiskinan

Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan di Provinsi Kalimantan Utara Untuk membangun koordinasi yang harmonis antar instansi sekaligus mencari solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi dan menyepakati tindak lanjut yang harus dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai peran dan kedudukannya.

#### • Tempat/waktu pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 dilaksanakan selama 3 (Tiga) hari terhitung mulai :

Hari : Selasa-Kamis

Tanggal : 04-06 September 2018

Waktu : 12.00 - Selesai

Tempat : Hotel Grand Pangeran Khar Tanjung Selor



- **Peserta Kegiatan**

Peserta Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 terdiri dari :

- a. Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda dan Litbang Prov. Kaltara
- b. Kepala Bagian Kesejahteraan Biro Kesra Prov. Kaltara
- c. Kepala Bagian Produksi daerah dan SDA Biro Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara
- d. Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltara
- e. Kepala Bidang Pelayanan dan SDK Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara
- f. Kepala Bidang dan Kepala Seksi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara
- g. Kepala Dinas, Kabid Linjamsos, Kabid dan Kasi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Utara berjumlah 19 (Sembilan belas) orang
- h. Kepala Bulog Sub-Divre Tanjung Selor

- **Narasumber**

1. Paparan Narasumber dari Direktorat Fakir Miskin Kemensos RI
2. Paparan Narasumber dari Bappeda Provinsi Kalimantan Utara.
3. Paparan Narasumber dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara;



Gambar 4.1 Dokumentasi Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan  
(Sumber: Dokumentasi Panitia)



Gambar 4.2 Dokumentasi Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan  
(Sumber: Dokumentasi Panitia)



**a. Pemberian Insentif Tagana**

Pembagian honorarium Tagana Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 118 orang dengan nominal Rp. 200.000/ bulan selama 10 bulan.

Tabel 4.6. Daftar nama penerima Insentif Tagana APBD

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>KAB/KOTA</b>	<b>NOMOR REKENING</b>
1	Pelda (Pur) Sapar	Bulungan	0072234693
2	Zubair, S.Pd	Bulungan	0072108523
3	Iskandar, SE	Bulungan	0072087208
4	Alimuiddin, S.Sos	Bulungan	0072334892
5	Jusmiadi	Bulungan	0072229771
6	Eli Khusnaeni, SE	Bulungan	0072231392
7	Anida Andrianie, S.Pd	Bulungan	0072237587
8	Bambang Rudiono, S.Pd	Bulungan	0072210352
9	Budi Syamsudin	Bulungan	0072229657
10	M. Donny Halim	Bulungan	1692010112
11	Aguenes	Bulungan	1372050345
12	Irma Lutfy Farlyna, SP	Bulungan	1372050370
13	Jusman	Bulungan	1372050388
14	Ismail Bin Idrus	Bulungan	1692010007
15	Rina Lesmana	Bulungan	1372050361



Tahun 2018

16	Reni Ingan	Bulungan	0072229673
17	Andi Nursamsul	Bulungan	0072184751
18	Hendryk L. Sigara, S.Sos	Bulungan	0072158971
19	Sunardi	Bulungan	1372050396
20	Ferry Pardiansyah, SE	Bulungan	1372050353
21	Ayu Utami Hasyfaraini	Bulungan	1372008071
22	Jul Akbar, S.Sos	Bulungan	1692010155
23	Rita Nurlela	Bulungan	0072334906
24	M. Robiansyah / Robitus	Bulungan	1372017887
25	Meylisa Harjanti	Bulungan	1692010368
26	Yahya Iskandar	Bulungan	0072229649
27	Edy Susanto	Bulungan	0072231309
28	Haryati	Bulungan	1692011445
29	Kasemin	Bulungan	0052392071
30	Eva Ratnasari	Bulungan	0052393990
31	Syahrullah	Bulungan	0072234847
32	Sugiyarto	Bulungan	0072299396
33	Abdul Latif	Bulungan	1702007379
34	Tri Baru Asih, S. Tr. Keb	Bulungan	0072208021
35	Dt. Mohd. Isa Ansari, SH	Bulungan	0072229754
36	Muhammad Zainuri	Bulungan	0072206592
37	Sugianto Sarijo	Bulungan	0072334485



Tahun 2018

38	Rudiansyah	Bulungan	1692010147
39	Muhammad Zendi Gazali	Bulungan	1372023038
40	Denny Rayfhian, SE	Bulungan	0058013706
41	Mashud, S. Sos	Bulungan	1692010104
42	Andri Purnomo	Bulungan	1372050230
43	Nurjanah, S. Kom	Bulungan	0078011301
44	Ajianto	Nunukan	1587002937
45	Andi Arman	Nunukan	0092700763
46	Samsul	Nunukan	1582008821
47	Slamet Budi Santoso, SH	Nunukan	1587002945
48	Nurdianti, SE	Nunukan	1587002902
49	Nur Eka	Nunukan	0092088260
50	Eva Wahyuni, SE	Nunukan	0092115836
51	Hasmiyati,S.Pd.I	Nunukan	0092003795
52	Fadli	KTT	0057094729
53	Muhammad Yusuf	KTT	0142068451
54	Ronie Selamat	KTT	1632003575
55	Wahaf	KTT	1632003583
56	Midun	Malinau	0122403335
57	Juarmanto	Malinau	0127410852
58	Dina Maryana, SE	Tarakan	1202023297
59	Ardiansyah	Tarakan	1202026041



Tahun 2018

60	Aidil Febriyan	Tarakan	1202057370
61	Agus Raharjo, S.Ip	Tarakan	0052292948
62	Kuswadi Jakaria	Tarakan	1207008407
63	Adnan Buyung	Tarakan	0052260213
64	Hermansyah, SE	Tarakan	1162052442
65	Aulianegara, S.H	Tarakan	1162041076
66	M.Fahrul Faiturrahman	Tarakan	1162048216
67	Irfan. M, SE	Tarakan	1162036552
68	Indra Ferdiansyah	Tarakan	0052430461
69	Muzakkir, SE	Tarakan	1167013950
70	Baharuddin	Tarakan	0052430208
71	Muhammad Haidir	Tarakan	0052344140
72	Fauzan Wahyudi, SE	Tarakan	0052269644
73	Yudi Heksawan	Tarakan	0052430372
74	Darmawan	Tarakan	1162036498
75	Syahrianto	Tarakan	1222068301
76	Muhammad Yusuf	Tarakan	1167015472
77	Firda Putri Ani, SE	Tarakan	0057045507
78	Feby Mulyani, SE	Tarakan	0052420881
79	Billy Ocean Tabang	Tarakan	1222033833
80	Adi Wibowo	Tarakan	1202065330
81	Herlinda	Tarakan	0052506671



82	Ardiansyah	Tarakan	1162059501
83	Nuraliansyah	Bulungan	0077036121
84	Abdul Munir	Bulungan	1162036439
85	Jamal	Bulungan	1692010139
86	Hariyadi	Bulungan	1692006379
87	Lucky Hardiantoro	Tarakan	1202039363
88	Yuliana Fesriana Batmomolin	Tarakan	0052430445
89	Sjafruddin	Tarakan	0052459648
90	Ananda Wira Pratama	Tarakan	0052431123
91	Teguh Adiyatma	Tarakan	0052460409
92	Robby Okto Pian	Bulungan	0072334388
93	Dorkas Namsung	Bulungan	0072229746
94	Ahmad Syahroni	Bulungan	0072185994
95	Burhanuddin	Bulungan	0072229827
96	Agustinus Aka	Bulungan	0072229801
97	M. Haryanto	Bulungan	0072270444
98	Muzakkar	Bulungan	0077050779
99	Hendra Wahyudi	Bulungan	1372016163
100	Jainiansyah	Bulungan	1628001550
101	M. Ali Usman	Bulungan	0072179013
102	Asep Suriyatman	Bulungan	0072259025
103	Jumaansyah	Bulungan	0072090357



104	Suardi	Bulungan	1692003311
105	Endar Kurniawan	Bulungan	1622002490
106	Naharuddin	Bulungan	0072203551
107	Sudirman, S.Ag	Bulungan	0072112385
108	Asri	Bulungan	0072222083
109	Raudhatul Munawwarah	Bulungan	0072221672
110	Mardiana	Bulungan	0077019961
111	Rafidin, S.Sos	Bulungan	0072071806
112	Arbain	Bulungan	0072003616
113	Sondi Julianto, ST	Bulungan	1162027979
114	Dedy Hardiyanto, S.Pd	Bulungan	0072259050
115	Hanafiah Indra. IG	Bulungan	0052371619
116	Syaharuddin	Bulungan	0072304845
117	Daniel passing	Bulungan	0072334663
118	Agustinus	Bulungan	0072241835



**a. Pemulangan Orang Terlantar**

Pemulangan orang terlantar pada tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.7. Daftar Nama OT yang dipulangkan

No	Nama	TTL/Umur	Alamat / Daerah Asal	Tanggal Pemulangan
1	Amiruddin	Sinjai, 08 November 1978/39 Tahun	Jl. Baruttung ,Tokka RT. 04 Alehanuae Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai Sul- Sel	27 Feb 2018
2	Rispa	Donggala, 22 Agustus 1999/ Tahun	RT.II Desa Lenju Kec. Sojol Utara Kab. Donggala Sul- Teng	27 Apr 2018
3	Raimundus	46 Tahun	Malaka Tengah Kec. Betun Kab. Atambua	12 Mei 2018
4	Rusdi	Sinjai, 08 November 1978/39 Tahun	Jl. Baruttung ,Tokka RT. 04 Alehanuae Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai Sul- Sel	27 Feb 2018
5	Rini Fitriani	Kudus, 31 Desember 1983/ 35 Tahun	Panti Muria Jaya Conge RT. 005 RW.002 Kel. Ngembalrejo Kec. Bae Kab. Kudus Ja – Teng	21 Sept 2018
6	M.Khoirul Anam	Palembang, 07 Juni 2004/ 14 Tahun	Panti Muria Jaya Conge RT. 005 RW.002 Kel. Ngembalrejo Kec. Bae Kab. Kudus Ja – Teng	21 Sept 2018
7	M.Fitria Fermansyah	Palembang, 12 Juli 2006/ 12 Tahun	Panti Muria Jaya Conge RT. 005 RW.002 Kel. Ngembalrejo Kec. Bae Kab. Kudus Ja – Teng	21 Sept 2018
8	Davia Anggreini	Palembang, 31 Desember 2010/ 8 Tahun	Panti Muria Jaya Conge RT. 005 RW.002 Kel. Ngembalrejo Kec. Bae Kab. Kudus Ja – Teng	21 Sept 2018
9	Mesyai Amelia Putri	Palembang, 12 Juli 2013/ 5 Tahun	Panti Muria Jaya Conge RT. 005 RW.002 Kel. Ngembalrejo Kec. Bae Kab. Kudus Ja – Teng	21 Sept 2018
10	Desti Maulana	Palembang, 27 Desember 2015/ 3 Tahun	Panti Muria Jaya Conge RT. 005 RW.002 Kel. Ngembalrejo Kec. Bae Kab. Kudus Ja – Teng	21 Sept 2018
11	Pepeng		5 Kilo 4 Batu Ampar Balikpapan Kal- Tim	12 Nov 2018



Gambar 4.3. Orang Terlantar yang akan dipulangkan an. Amiruddin  
(Sumber: Dokumentasi Panitia)



Gambar 4.4. Orang Terlantar yang akan dipulangkan  
(Sumber: Dokumentasi Panitia)



Gambar 4.5. Orang Terlantar yang akan dipulangkan  
(Sumber: Dokumentasi Panitia)

**b. Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH)**

Tabel 4.8. Daftar Nama ABH

No	Nama	Alamat	Keterangan
1	Moh. Yusril	Jl. Pamanasan RT 03 Kec. Mansapa Kel. Nunukan Selatan	Penjemputan dari Panti Sosial Marsudi Putra Handayani, Bambu Apus Jakarta



Gambar 4. 6 Penjemputan ABH  
(Sumber: Dokumentasi Panitia)



Gambar 4. 7 Pertemuan ABH denan orang tua  
(Sumber: Dokumentasi Panitia)

**c. Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)**

Tabel 4.9. Daftar Nama Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah Sosial

No	N a m a	TTL/Umur	Alamat / Daerah Asal	Tanggal Pemulangan
1	Wagino	Sei Baruhur, 27 Agustus 1987/ 31 Tahun	Jl. Ranim RT.002 Kel/ Desa Bagan Nibung Kec. Simpang Kanan Kab.Rokan Hilir	25 Juli 2018
2	Wariska Diana Zuliati	Tuban, 09 Juli 1992/ 26 Tahun	Jl. Ranim RT.002 Kel/ Desa Bagan Nibung Kec. Simpang Kanan Kab.Rokan Hilir	25 Juli 2018
3	Dian	Yogyakarta, 22 Oktober 2016/ 2 Tahun	Jl. Ranim RT.002 Kel/ Desa Bagan Nibung Kec. Simpang Kanan Kab.Rokan Hilir	25 Juli 2018
4	Mhd.Alim Efendi	Kisaran, 09 April 1983/ 35 Tahun	Jl. Ranim RT.002 Kel/ Desa Bagan Nibung Kec. Simpang Kanan Kab.Rokan Hilir	25 Juli 2018
5	M. Affendi Bin Abdullah	Sulsel, 22 Feb 1972/ 46	Daerah Pasir Putih, Kec. Nunukan Prov. Kaltara	25 Juli 2018



Gambar 4.8. Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah Sosial

(Sumber: Dokumentasi Panitia)



Gambar 4.9. Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah Sosial  
(Sumber: Dokumentasi Panitia)

### **3) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin**

#### **a. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat**

##### **1. Bimtek TKSK**

Untuk mendorong upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial sampai tingkat Kecamatan kearah yang lebih baik, maka Departemen Sosial memprakarsai terbentuknya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disebut TKSK sebagai perwujudan partisipasi sosial masyarakat. TKSK merupakan pelaksana pendampingan sosial yang bisa menjembatani program Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengerakkan masyarakat dan potensi kesejahteraan lainnya. Keberadaan TKSK juga dapat mendukung pelaksanaan pendekatan anggaran berbasis kinerja (performance based bugeting) yang membutuhkan pemetaan target sasaran sehingga diperlukan orang yang berada dilokasi sasaran Pemerintah Daerah dalam kaitan ini Dinas Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota diharapkan



dapat membina dan mendayagunakan TKSK dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Untuk itu perlu dilakukan bimbingan teknis Untuk meningkatkan kualitas kinerja TKSK dalam melaksanakan tugas pelayanan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Agar TKSK dapat memahami ragam kegiatan pendampingan sosial yang perlu dilaksanakan Dan untuk mengetahui permasalahan apa saja yang terjadi didalam PMKS dan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut.

- **Tempat/waktu pelaksanaan kegiatan**

Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis TKSK Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung mulai :

Hari : Senin - Rabu

Tanggal : 12 – 14 Maret 2018

Waktu : 12.00 - Selesai

Tempat : Hotel Grand Pangeran Khar Tanjung Selor

- **Peserta Kegiatan**

Peserta Bimbingan Teknis Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang berasal dari Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara dengan rincian sebagai berikut:

1. Kabupaten Bulungan sebanyak 10 orang
2. Kabupaten Malinau 7 orang
3. Kabupaten Nunukan sebanyak 8 orang
4. Kota Tarakan sebanyak 2 orang

5. Kabupaten Tana Tidung sebanyak 3 orang

• **Narasumber**

1. Drs. H. Sugiono, M.Si (Kepala Dinas Sosial Prov. Kaltara);
2. Hj. Sumiati, SE (Sekretaris Dinas Sosial Prov. Kaltara);
3. Dra. Hj. Arsanah (Kepala Bidang dayasos dan PFM Dinas Sosial Prov. Kaltara);
4. Drs. Timbul Sibarani, M.AP (Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintah BAPPEDA Prov. Kaltara)



Gambar 4. 10 Bimtek TKSK APBD  
(Sumber: Dokumentasi Panitia)

**2. Pemberian Tali Asih TKSK**

Daftar Penerima Insentif Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 55 Orang @ Rp 400.000/Bulan.

Tabel 4. 10. Daftar Nama Penerima Tali Asih TKSK APBD

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>No Rekening</b>	<b>Bank</b>
01	Berahim	0092715493	Bank Kaltimara



02	Armansyah,S.Sos	1742000547	Bank Kaltimtara
03	Suharjo	0092116719	Bank Kaltimtara
04	Syahrudin, SH	1072050327	Bank Kaltimtara
05	Rasdiana	1077037604	Bank Kaltimtara
06	Muddar	0097205931	Bank Kaltimtara
07	Paskalis	0092159710	Bank Kaltimtara
08	Muh. Ramadan, A.Md	1602017326	Bank Kaltimtara
09	Ari Rahman Ananda, SE	122406083	Bank Kaltimtara
10	Fini Lily	122300277	Bank Kaltimtara
11	Dewi Nova Vristina	122501701	Bank Kaltimtara
12	Patria, A. Md	122915450	Bank Kaltimtara
13	Jekson, S. Sos	0122914577	Bank Kaltimtara
14	Kahang, S.Sos	0122227448	Bank Kaltimtara
15	Hermansyah	1162052442	Bank Kaltimtara
16	Dina Suryana Pratama Sari	0052429862	Bank Kaltimtara
17	Ardiansyah	1202026041	Bank Kaltimtara
18	M. Fahrul Faiturrahman	1162048216	Bank Kaltimtara
19	Mohamad Hamzah, S.Sos	0072255771	Bank Kaltimtara
20	Hendra Wahyudi	1372016163	Bank Kaltimtara
21	Jul Akbar, S.Sos	1692010155	Bank Kaltimtara
22	Endar Kurniawan	1622002490	Bank Kaltimtara
23	Jainiansyah	1628001550	Bank Kaltimtara
24	Hariyadi	1692006379	Bank Kaltimtara
25	Suardi	1692003311	Bank Kaltimtara
26	Naharuddin	72203551	Bank Kaltimtara
27	Jaimah, Z	0072223730	Bank Kaltimtara
28	Jainah Aprilliani, S.Pi	1637000302	Bank Kaltimtara
29	Rina Susilawati	0147034661	Bank Kaltimtara
30	Ridwan	0142053519	Bank Kaltimtara
31	Sungkowo	0142067058	Bank Kaltimtara



32	Chaerul Bahri	164401000936535	BRI
33	Saharuddin	459701012055537	BRI
34	Indra Bangsawan	789801003638533	BRI
35	Susana Tiku Mairi., A.Md	361501002166509	BRI
36	Margareta, A. Md	224601000878502	BRI
37	Roni Aldiki, SH	224601001829530	BRI
38	Abiah Daniel, SE	351501015777535	BRI
39	Samuel Surang, S.Sos	361501022848539	BRI
40	Rostiana, S.Sos	343601012902531	BRI
41	Arianthi Ajang, SE	361501023053535	BRI
42	Tugianto	343801024101537	BRI
43	Lenni Tambun ST	343801021346536	BRI
44	Sunardi	458801001875539	BRI
45	Muhamad Doni Halim	343801001282508	BRI
46	Irma Lutfy Farlyna,SP	343801026230536	BRI
47	Aguenes	458801011909530	BRI
48	Wahyuni Setiya Wardhana	030601015601502	BRI
49	Agutinus Aka	458901008792532	BRI
50	Reni Ingan	343801029047534	BRI
51	Anike Vesti	733701004050532	BRI
52	Yudi Ardiansyah, S.Pd	733701001260502	BRI
53	Ummi Wahdaniaah	018301008851536	BRI
54	Ruslan, SH	343801017180532	BRI
55	Rina Lesmana SP, MM	0252034544	BNI

### 3. Bimtek PSM

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara PSM mempunyai posisi yang strategis bagi masa depan bangsa.



Kemajuan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditentukan oleh kualitas PSM sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam mewujudkan aktualisasi ditengah tengah kehidupan masyarakat. Pengaruh budaya global akan mudah mengubah pola pikir, sikap dan perilaku para Pekerja sosial Masyarakat. Dengan kecanggihan teknologi informasi yang begitu mudah di akses jelas akan mempercepat proses akulturasi dikalangan Pekerja Sosial Masyarakat.

Keberadaan Pekerja Sosial Masyarakat dalam penanganan PMKS sangat diharapkan selain sebagai pendamping sosial bagi warga masyarakat juga dapat menginisiasi penanganan masalah sosial dan mendorong, mengerakkan serta mengembangkan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan harapan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) menjadi bagian keberhasilan bangsa ini dalam meneruskan estafet pembangunan kesejahteraan sosial.

- **Tempat/Waktu Pelaksanaan Kegiatan.**

Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung mulai :

Hari :Selasa - Kamis

Tanggal :10 – 12 April 2018

Waktu :12.00 - Selesai

Tempat :Hotel Grand Pangeran Khar Tanjung Selor

- **Peserta Kegiatan**



Peserta Bimbingan Teknis Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 adalah PSM yang berasal dari Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara dengan rincian sebagai berikut:

1. Kabupaten Bulungan sebanyak 10 orang
2. Kabupaten Malinau 2 orang
3. Kabupaten Nunukan sebanyak 4 orang
4. Kota Tarakan sebanyak 10 orang
5. Kabupaten Tana Tidung sebanyak 4 orang

• **Narasumber**

1. Drs. H. Sugiono, M.Si (Kepala Dinas Sosial Prov. Kaltara);
2. Hj. Sumiati, SE (Sekretaris Dinas Sosial Prov. Kaltara);
3. Dra. Hj. Arsanah (Kepala Bidang dayasos dan PFM Dinas Sosial Prov. Kaltara);
4. Syamsaimun, S.Pi, MP (Kasubbid Kesejahteraan Rakyat BAPPEDA dan Litbang Prov. Kaltara)orang.



Gambar 4. 11. Pembukaan Bimtek PSM APBD oleh Kadis  
Dinsos Kaltara  
(Sumber: Dokumentasi Panitia)



Gambar 4. 12. Bimtek PSM APBD  
(Sumber: Dokumentasi Panitia)

#### **b. Bimtek Karang Taruna**

Pembangunan kesejahteraan sosial sebagaimana pembangunan secara umum tidak mungkin dilaksanakan oleh pemerintah sendiri. Pembangunan harus dilaksanakan secara sinergis antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Berangkat dari titik ini, upaya yang terus dihembuskan yaitu mengurangi secara signifikan peran-peran dominan pemerintah dan sekaligus membuka ruang-ruang baru bagi masyarakat untuk menjadi pelaku dalam pembangunan. Pemerintah diharapkan memposisikan diri bukan sebagai prorider pembangunan tetapi lebih pada perannya sebagai fasilitator, regulator, dan pengendali.

Dalam arus modernisasi saat ini, Karang Taruna harus merubah tatanan baru dalam dimensi kelembagaan. Perubahan-perubahan signifikan dalam mengikuti arus globalisasi dan desentralisasi ternyata memunculkan tantangan terbuka yang sangat dinamis mulai dari tingkat gagasan hingga aksi langsung ditengah masyarakat. Pergolakan juga seringkali muncul dalam penyelenggaraan organisasi sebagaimana lazimnya sebuah organisasi yang dikelola oleh kaum muda, disamping tentunya budaya dan etos kerja organisasi yang memang terus menuntut peningkatan seiring dengan perubahan masyarakat yang terjadi.

Untuk mendorong upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial kearah yang lebih baik, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara



memberikan materi yang terangkai dalam kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Karang Taruna yang menyasar pada karang taruna yang berada di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara

- **Tempat/Waktu Pelaksanaan Kegiatan.**

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Karang Taruna dilaksanakan di Hotel Grand Pangeran Khar, sedangkan pembukaannya dilaksanakan di Gunung Sari KM.12 Pondok Pesantren Fatimah Azzahra pada Tanggal 11 Oktober 2018 yang juga memperingati hari Bulan Bakti Karang Taruna dan Hari kesetiakawanan Sosial Nasional.

Jadwal Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas karang Taruna Tahun 2018 :

Hari : Selasa – Jumat

Tanggal : 09 – 12 Oktober 2018

Registrasi Peserta : Selasa, 09 Oktober 2018, Pukul 13.00 Siang

- **Peserta Kegiatan**

Peserta kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Karang Taruna Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. Karang Taruna Kota Tarakan	: 13 orang
2. Karang Taruna Kab. Bulungan	: 25 orang
3. Karang Taruna Kab. Nunukan	: 13 orang
4. Karang Taruna Kab. Malinau	: 12 orang
5. Karang Taruna Kab. Tana Tidung	: 12 orang
Total keseluruhan peserta	: 75 orang

- **Narasumber**

Narasumber Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas karang Taruna Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 berasal dari Kementerian Sosial RI sebanyak 1 (satu) orang, Tim Percepatan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 1 (satu) orang, dan dari Dinas

Sosial provinsi Kalimantan Utara sebanyak 2 (dua) orang yaitu :

1. Devi Deliani, S.ST, M.Kesos selaku Kepala Seksi Karang Taruna Kemensos RI;
2. Arkanata Akram, S.T, B.E.(Hons), MEngSc selaku Tim Percepatan Pembanguna Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
3. Drs. H. Sugiono, M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Prov. Kaltara;
4. Dra. Hj. Arsanah selaku Kepala Bidang Dayasos dan PFM Dinsos Prov. Kaltara.



Gambar 4. 13.Pembukaan Bimtek Karang Taruna  
(Sumber: Dokumentasi Panitia)



Gambar 4. 14. Materi Oleh Tim Percepatan Pembangunan Daerah Prov. Kaltara oleh Arkanata Akram, S.T, B.E.(Hons), MEngSc  
(Sumber: Dokumentasi Panitia)

### **c. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)**

Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Sedangkan Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah Komunitas Adat Terpencil yang selanjutnya disingkat dengan KAT adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.

Adapun tujuan Pemberdayaan Sosial terhadap KAT bertujuan untuk mewujudkan Perlindungan hak sebagai warga negara, Pemenuhan kebutuhan dasar, Integrasi KAT



dengan sistem sosial yang lebih luas, dan Kemandirian sebagai warga negara. Sedangkan kriteria KAT dimaksud meliputi : Keterbatasan akses pelayanan sosial dasar, Tertutup, homogen, dan penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam, Marjinal di pedesaan dan perkotaan; dan/atau Tinggal di wilayah perbatasan antar negara, daerah pesisir, pulau-pulau terluar, dan terpencil.

Pemberdayaan Sosial terhadap KAT dilaksanakan dalam bidang; permukiman; administrasi kependudukan; kehidupan beragama; kesehatan; pendidikan; ketahanan pangan; penyediaan akses kesempatan kerja; penyediaan akses lahan; advokasi dan bantuan hukum; pelayanan sosial; dan lingkungan hidup.

## **1. Pemetaan Sosial**

Kegiatan persiapan pemberdayaan dimulai dengan kegiatan Pemetaan Sosial. Pemetaan Sosial merupakan kegiatan verifikasi data demografi, geografis, dan spasial serta informasi lainnya terhadap lokasi yang diprediksi dihuni KAT. Lokasi yang menjadi lokasi kegiatan ini adalah lokasi KAT yang terdapat pada database Pemberdayaan KAT. Lokasi tersebut diprediksi atau diasumsikan dihuni warga KAT berdasarkan informasi yang diperoleh dari petugas dan/atau masyarakat, serta diusulkan

dinas/instansi sosial daerah baik kabupaten maupun provinsi sebagai calon lokasi Pemberdayaan KAT.

## **2. Penjajagan Awal dan Studi Kelayakan**

Penjajagan Awal (PA) merupakan kegiatan penilaian terutama berdasarkan pertimbangan aspek etnografi dan sosiologi dalam instrumen untuk menentukan KAT atau bukan KAT serta menetapkan kategori KAT. Sedangkan Studi Kelayakan (SK) merupakan kegiatan identifikasi masalah dan kebutuhan, serta alternatif pemecahan masalah KAT mengingat luasnya pranata sosial budaya warga KAT, maka studi yang dilaksanakan terfokus pada beberapa aspek yang dapat dirubah tanpa harus meninggalkan nilai-nilai budayanya.



Gambar 4. 15. Penjajagan Awal dan Studi Kelayakan  
(Sumber: Dokumentasi Panitia)



Gambar 4. 16. Penjajagan Awal dan Studi Kelayakan  
(Sumber: Dokumentasi Panitia)

### **3. Seminar dan Lokakarya (Semiloka) Daerah**

Seminar dan Lokakarya (Semiloka) dilaksanakan untuk membahas hasil penjajagan awal dan studi kelayakan (PA/SK) guna mendapat saran dan pertimbangan terhadap rencana awal pemberdayaan KAT. Melalui kegiatan ini akan disampaikan tentang sinergi dan kontribusi berbagai pihak yang akan dilibatkan sesuai tugas, fungsi dan wewenang masing-masing.

Semiloka Daerah bertujuan untuk menginformasikan secara utuh kondisi etnografis lokasi hasil Penjajagan Awal dan Studi Kelayakan dengan merumuskan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan di lokasi sesuai kondisi setempat.



Gambar 4. 17. Kegiatan Semiloka di kab. Nunukan  
(Sumber: Dokumentasi Panitia)



Gambar 4. 18. Kegiatan Semiloka di kab. Nunukan  
(Sumber: Dokumentasi Panitia)

#### **d. Pembinaan Lembaga RPTC**

Kegiatan pembinaan lembaga RPTC dilaksanakan dengan melakukan monitoring dan koordinasi ke Lembaga Rumah Penyandang Trauma Center (RPTC) di Kab. Nunukan.



Gambar 4. 19. Kegiatan Pembinaan lembaga RTPC  
(Sumber: Dokumentasi Panitia)



Gambar 4. 20. Kegiatan Pembinaan lembaga RTPC  
(Sumber: Dokumentasi Panitia)

## e. Bantuan KUBE Bagi Fakir Miskin

### 1. Sosialisasi KUBE

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial RI sejak tahun 1983 telah meluncurkan program penanganan kemiskinan melalui Kelompok Usaha

Bersama (KUBE) selama lebih kurang 28 tahun, KUBE masih merupakan ikon Kementerian Sosial. berdasarkan hasil penelitian Haryati Roebyantho dalam bukunya yang berjudul “Dampak Sosial Ekonomi Program Penanganan Kemiskinan melalui KUBE” yang diterbitkan oleh P3KS Press tahun 2012 dari hasil evaluasinya direkomendasikan bahwa KUBE masih merupakan program alternatif penanganan kemiskinan.

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara melalui Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Tahun 2018 melaksanakan Kegiatan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi Keluarga Miskin di 2 (Dua) Kabupaten Provinsi Kalimantan Utara yaitu Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan.



Gambar 4.21 Bantuan KUBE di Kab. Nunukan  
(Sumber: Dokumentasi Panitia )



Gambar 4.22 Bantuan KUBE di Kab. Nunukan  
(Sumber: Dokumentasi Panitia )



Gambar 4.23 Bantuan KUBE di Kab. Tana Tidung  
(Sumber: Dokumentasi Panitia)



Gambar 4.24 Bantuan KUBE di Kab. Tana Tidung  
(Sumber: Dokumentasi Panitia )

#### 4) UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu

Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu yang terletak di Jalan Kakatua Tanjung Selor diantaranya adalah sebagai berikut:

##### 1. Kegiatan Bimbingan Sosial



Gambar 4.25 Kegiatan Bimbingan Sosial di UPTD Panti Sosial  
(Sumber: Dokumentasi Panitia )

##### 2. Kegiatan Bimbingan Keterampilan



Gambar 4.26 Kegiatan Bimbingan Keterampilan  
di UPTD Panti Sosial  
(Sumber: Dokumentasi Panitia )



### 3. Kegiatan Bimbingan Olahraga / Senam



Gambar 4.27 Kegiatan Bimbingan Olahraga/ Senam  
(Sumber: Dokumentasi Panitia )

### 4. Kegiatan Posyandu Lansia



Gambar 4.28 Kegiatan Posyandu Lansia  
(Sumber: Dokumentasi Panitia )

## 5. Kegiatan Lomba-Lomba



Gambar 4.29 Kegiatan Lomba-Lomba  
(Sumber: Dokumentasi Panitia )

## 6. Kegiatan Pelayanan



Gambar 4.30 Kegiatan Posyandu Lansia  
(Sumber: Dokumentasi Panitia )



## 1) Kegiatan APBN:

### a. Direktorat Sekretariat Jenderal

#### 1. Sosialisasi Perencanaan dan Program Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018

Maksud dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk melakukan pertemuan koordinasi antar Perencana Pembangunan Kesejahteraan Sosial Provinsi Kalimantan Utara dengan Perencana Pembangunan Kesejahteraan Sosial Kabupaten/ Kota dalam rangka menginventarisasi usulan perencanaan program dan anggaran pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2018 dan Terinformasikannya program penyelenggaraan kesejahteraan sosial Kementerian Sosial RI yang dialokasikan dananya melalui Dekonsentrasi dan Pemerintah Daerah melalui APBD Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Utara;

Tujuan Penyelenggaraan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya sinergitas antara Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk mencapai sasaran pembangunan Kesejahteraan Sosial.
- b. Tersosialisasikannya Perencanaan Program dan Anggaran Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Dana Dekonsentrasi tahun 2018.

#### • Tempat/waktu pelaksanaan kegiatan



Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Program Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 dilaksanakan selama 2 (Dua) hari terhitung mulai:

Hari : Jumat-Sabtu  
Tanggal : 07-08 September 2018  
Waktu : 08.00 Pagi – Selesai  
Tempat : Hotel Grand Pangeran Khar, Jl.  
Katamso, Tanjung Selor

### **Kegiatan**

Peserta Sosialisasi Perencanaan Program Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 terdiri dari :

- a. Peserta dari Dinas Provinsi Kalimantan Utara 5 Orang
- b. Kepala Bidang dan Kasubdit/Kasubbag Perencanaan Kabupaten/ Kota sebanyak 15 (Lima belas) Orang.  
Total Peserta **20 (Dua Puluh)** Orang.

### **•Narasumber**

1. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara.
2. Bappeda Provinsi Kalimantan Utara.
3. Kepala Bidang Linjamsos dan Rehsos Provinsi Kalimantan Utara.

### **•Materi**

Materi Sosialisasi Program Provinsi Kalimantan Utara khususnya Bidang Rehsos Tahun 2018 meliputi :

1. Materi Arah kebijakan dan Strategi Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Materi Program Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara;
3. Materi Program Pembangunan Bidang Sosial;



Gambar 4.31 Sosialisasi Perencanaan dan Program Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018  
(Sumber: Dokumentasi Panitia )



Gambar 4.32 Sosialisasi Perencanaan dan Program Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018  
(Sumber: Dokumentasi Panitia )



## **2. Koordinasi Unit Program Dengan Unit Teknis**

Tahun Anggaran 2018 merupakan tahun kedua pembuktian kinerja pemerintah baru yang berimplikasi pada adanya perubahan atas rencana program pembangunan yang disusun dan ditetapkan pada tahun sebelumnya. Termasuk diantaranya pembangunan kesejahteraan sosial, kebijakan pemberlakuan kartu kesejahteraan sosial, kartu Indonesia sehat, kartu Indonesia pintar dimana Kementerian Sosial RI sebagai leading sektor mengakibatkan banyak isu strategis baru yang harus terkait dengan implementasi program pembangunan kesejahteraan sosial yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pertemuan Koordinasi Unit Program dengan Unit Teknis sangat dibutuhkan untuk menjawab dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan diatas. Sehingga pelaksanaan program kesejahteraan sosial tetap dapat berjalan sesuai yang direncanakan dan masyarakat penerima sasaran lebih cepat menerima hasil pembangunan.

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu program/kegiatan dalam implementasinya ialah tahapan koordinasi antara unit program dan unit teknis. Koordinasi Unit Program dengan Unit Teknis merupakan satu tahapan untuk mensinkronkan program dan kegiatan antara program dan teknis kepada seluruh stakeholder pembangunan termasuk pembangunan bidang kesejahteraan sosial agar mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

Koordinasi Unit Program dengan Unit Teknis ini diselenggarakan dengan maksud :



1. Untuk menyamakan persepsi pelaksanaan program kegiatan sumber dana APBN Tahun 2018.
2. Untuk mendapatkan informasi rencana perubahan atau revisi belanja Tahun Anggaran 2018.
3. Untuk mendapatkan informasi awal usulan program kegiatan tahun 2019.

Tujuan Unit Program dengan Unit Teknis ini diselenggarakan adalah :

1. Menghasilkan kesepakatan dalam pelaksanaan program kegiatan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2018.
2. Menghasilkan usulan rencana perubahan atau revisi rincian belanja Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan kondisi terkini.
3. Menghasilkan informasi usulan awal program kegiatan Tahun Anggaran 2018.

- **Tempat/waktu pelaksanaan kegiatan**

Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Unit Program Dengan Unit Teknis Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 dilaksanakan :

Hari : Rabu s/d Jumat  
Tanggal : 25-27 Juli 2018  
Waktu : 08.00 Pagi - Selesai  
Tempat : Hotel Pangeran Grand Khar Tanjung Selor

- **Peserta Kegiatan**

Adapun Peserta Kegiatan Koordinasi Unit Program Dengan Unit Teknis Total peserta sebanyak 25 orang.

Peserta Kegiatan Koordinasi Unit Program Dengan Unit Teknis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 adalah Kepala Bidang Sosial, Kepala Seksi, Kasi dan Staf yang berasal dari Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara dengan rincian:

1. Kabupaten Bulungan sebanyak 3 orang;
2. Kabupaten Malinau 3 orang;
3. Kabupaten Nunukan sebanyak 3 orang;
4. Kota Tarakan sebanyak 3 orang;
5. Kabupaten Tana Tidung sebanyak 3 orang;
6. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 5 Orang;

• **Narasumber**

1. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara.
2. Kepala Bidang Linjamsos dan Rehabsos Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara.
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara.

• **Materi**

Materi Koordinasi Unit Program Dengan Unit Teknis Provinsi Kalimantan Utara khususnya Bidang Rehsos Tahun 2018 meliputi :

1. Kebijakan dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Tahun 2018;
2. Program dan Kegiatan Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Prov.Kaltara Melalui Dana Dekonsentrasi Tahun 2018;
3. Program dan Kegiatan Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;



Gambar 4.33 Koordinasi Unit Program Dengan Unit Teknis  
(Sumber: Dokumentasi Panitia )



Gambar 4.34 Koordinasi Unit Program Dengan Unit Teknis  
(Sumber: Dokumentasi Panitia )



## **b. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial**

### **1. Penjangkauan dan Seleksi Korban Peyalahgunaan Napza**

Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang biasa disebut dengan narkoba merupakan jenis obat/zat yang diperlukan di dalam dunia pengobatan. Bahan/zat apabila dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral /diminum, dihirup maupun disuntikan dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Apabila narkoba dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat menimbulkan ketergantungan serta dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya. Dampak narkoba akanlah sangat berbahaya bagi manusia dan dapat merusak kesehatan manusia baik secara fisik, emosi, maupun perilaku pemakainya.

Data menunjukkan bahwa jumlah pengguna narkoba yang paling banyak adalah kelompok usia remaja hingga dewasa. Persoalan akan menjadi lebih gawat lagi bila pada penggunaan narkoba, para pemuda tertular dan menularkan HIV/AIDS di kalangan pemuda. Hal ini telah terbukti dari pemakaian narkoba melalui jarum suntik secara bergantian.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan dan perundang-undangan serta peraturan, antara lain Undang Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 54 bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan NAPZA wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi tersebut dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang



Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika. Pelaksanaan rehabilitasi sosial menjadi kewenangan instansi sosial. Ketentuan lain yang mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan NAPZA menjalani rehabilitasi, dengan adanya surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2010 dan Nomor 03 tahun 2011.

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara melalui dana Dekonsentrasi/APBN yang berasal dari Kementerian Sosial RI Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza mengadakan kegiatan Rehabilitasi Sosial melalui program penjangkauan/pendampingan, dengan tujuan :

1. Mempersiapkan klien Korban Penyalahgunaan Napza untuk mengikuti bimbingan keterampilan mengenai usaha yang akan dilakukan dalam mengelola dana bantuan stimulant UEP dengan baik dan benar sehingga dapat mengembangkan usaha /ketrampilan yang dimiliki tersebut;
2. Untuk menjangkau kepada calon klien(eks pecandu narkotika) yang akan diikutkan program rehabilitasi sosial luar panti.
3. Melakukan pendampingan program kepada calon klien (eks pecandu narkotika) yang akan mengikuti program rehabilitasi sosial luar panti.

• **Tempat/Waktu Pelaksanaan Kegiatan**

Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza di Luar Panti Melalui Penjangkauan dan Seleksi KP Napza Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 dilaksanakan selama 1 (Satu) hari yaitu:

Hari : Sabtu

Tanggal : 03 November 2018



Waktu : 08.00 Wita - Selesai  
Tempat : Hotel Galaxy Kota Tarakan

• **Peserta Kegiatan**

Peserta Kegiatan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza di Luar Panti melalui Penjangkauan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 adalah:

- a. Penanggung Jawab Kegiatan dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 1 (Satu) Orang;
- b. Panitia Provinsi dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 2 (Dua) Orang;
- c. Panitia Kabupaten/Kota dari Dinas Sosial Kabupaten Bulungan sebanyak 1 (Satu) Orang;
- d. Korban Penyalahgunaan Napza yang sudah menjalani Rehabilitasi Medis dan Perlindungan Sosial di luar panti yang merupakan rekomendasi dari BNK Kota Tarakan sebanyak 11 (sebelas) orang.

• **Materi dan Narasumber Kegiatan:**

Materi Kegiatan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza di Luar Panti Melalui Penjangkauan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 disampaikan oleh Narasumber dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara yaitu Kepala Bidang Linjamsos dan Rehabsos Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara.



Gambar 4.35 Penjangkauan Korban Peyalahgunaan  
Napza  
(Sumber: Dokumentasi Panitia )



Gambar 4.36 Penjangkauan Korban Peyalahgunaan  
Napza  
(Sumber: Dokumentasi Panitia )



## 2. Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK)

Unit Pelayanan Sosial Keliling adalah sarana pelayanan sosial yang bergerak untuk menjangkau lokasi PMKS sampai ketinggian desa/Kelurahan agar dapat memperoleh pelayanan sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya dan mencari solusi terbaik.

Kegiatan UPSK bersifat interdisipliner dan lintas sectoral sehingga penyelenggaraannya diperlukan keterlibatan berbagai instansi terkait utamanya jajaran pemerintahan daerah di lokasi kegiatan. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dilaksanakan mengacu pada Program Prioritas Nasional yang selanjutnya diterjemahkan menjadi kebijakan umum Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yaitu meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas berbasis hak. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosialnya secara wajar. Fokus pelaksanaannya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar, akses hak dasar (pelayanan dasar) dan inklusivitas.

Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) adalah sarana pelayanan dan rehabilitasi sosial yang diarahkan untuk menjangkau lokasi penyandang disabilitas sampai ketinggian desa untuk memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial sedini mungkin. Kegiatan UPSK dimaksudkan untuk meningkatkan dan memperluas jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas sehingga lebih adil dan merata melalui kegiatan penyebaran informasi dan deteksi dini. Kegiatan UPSK dilakukan dalam kurun waktu 1 sampai 2 hari dalam satu kali putaran.



Tujuan dari Kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Melakukan identifikasi data penyandang disabilitas yang membutuhkan akses hak dasar.
2. Informasi dan identifikasi data penyandang disabilitas yang membutuhkan akses literasi khusus.
3. Identifikasi data penyandang disabilitas yang membutuhkan alat bantu.

• **Tempat/waktu pelaksanaan kegiatan**

Pelaksanaan Kegiatan Unit Pelayanan Sosial Keliling Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 dilaksanakan selama 1 (Satu) hari terhitung mulai :

Hari : Jumat

Tanggal : 10 Agustus 2018

Waktu : 09.30 Pagi - Selesai

Tempat : Kantor Kecamatan Tanjung Palas Utara

• **Peserta Kegiatan**

Adapun Peserta Kegiatan Unit Pelayanan Sosial Keliling berjumlah sebanyak 20 orang.

• **Dokter, Psikolog dan Peksos**

1. Dr. Retno Imam Widyawanto (Puskesmas Tanjung Palas Utara)
2. Sitti Jumeriah, M.Psi (Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Kaltimtar)
3. Mayasti Devi Asnianti, S.Psi (Himpunan Psikologi Wilayah Kaltimtar)
4. Yudi Ardiansyah ( Peksos Dinas Sosial Kab.Bulungan)
5. Anike Vesti ( Peksos Dinas Sosial Kab.Bulungan)



Gambar 4.37 Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK)  
(Sumber: Dokumentasi Panitia )



Gambar 4. 38. Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK)  
(Sumber: Dokumentasi Panitia )



### 3. **Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila (WTS)**

Prostitusi terus berkembang seiring dengan kebijakan yang di berikan pemerintah oleh pertimbangan kesehatan. Hal ini menandakan bahwa pelacuran dilokalisasi sudah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama.

Wanita Tuna Susila (WTS) sampai sekarang masih menjadi polemik, materi perdebatan masalah ini cukup beragam mulai dari keabsahan profesi WTS, penyebut istilah WTS, sampai pada pola penanganan WTS. Sebagai Instansi Pemerintahan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara telah memilih sikap berada pada posisi Pelaksana Rehabilitasi dimana WTS diposisikan sebagai Klien / orang yang memiliki masalah.

Keberadaan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara sangat diperlukan perannya dalam mengentaskan Prostitusi yang semakin mengemaskan, hal ini diperparah dengan adanya prostitusi yang terdapat di Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.

Oleh karena itu Tuna Susila sebagai penyandang masalah kesejahteraan social sangat memerlukan penanganan yang Terintegrasi dan Terorganisasi. Untuk itu diperlukan suatu mekanisme yang dapat memecahkan masalah social tuna social tersebut melalui pelayanan Bimbingan Sosial dan Kursus Keterampilan.

Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan Bimbingan ini adalah :

1. Terbina dan berkembangnya tata kehidupan dan penghidupan sosial para wanita tuna susila yang diliputi pemulihan kembali rasa harga diri, kepentingan



- diri, tanggungjawab social serta kemauan dan kemampuan melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat;
2. Memulihkan kondisi fisik, mental, psikis, sosial, sikap dan perilaku wanita tuna susila agar mereka mampu melaksanakan fungsi social secara wajar dalam kehidupan keluarga dan dalam masyarakat.
  3. Agar Wanita Tuna Susila memiliki kemampuan dalam berIntegrasi dengan lingkungan dan dapat menguasai/memiliki keterampilan, sehingga dapat bekerja dan berusaha pada sector sector yang dapat diterima oleh masyarakat.

• **Tempat/waktu pelaksanaan kegiatan**

Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Wanita Tuna Susila di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 dilaksanakan selama 7 (Tujuh) hari terhitung mulai:

Hari : Selasa s/d Senin

Tanggal : 22-28 November 2018

Waktu : 08.00 Pagi - Selesai

Tempat : Tempat Lokalisasi Kab.Nunukan

• **Peserta Kegiatan**

Adapun Peserta Kegiatan Bimbingan dan Rehabilitas Sosial Bagi Wanita Tuna Susila yang berada dikawasan Kabupaten Nunukan Total peserta sebanyak 15 orang.



Tabel 4.11 Peserta Kegiatan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial

No	Nama	Alamat
1	Mia	Magetan
2	Datah	Jombang
3	Sumarni	Bojonegoro
4	Siti Juwariyah	Lumajang
5	Ni' Matturohmah	Pasuruan
6	Wiwit	Madura
7	Suryani	Madiun
8	Desi	Bojonegoro
9	Erna	Bojonegoro
10	Nining F	Pasuruan
11	Sih Juaro	Pasuruan
12	Linda	Malang
13	Sujanida	Probalingga
14	Sulastri	Nganjuk
15	Cris Tiana	Semarang

• **Narasumber dan Materi**

1. Yaksi Belaning Pratiwi, SE (Dinas Sosial Kabupaten Nunukan);
2. Nurhadi (Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan).

• **Petugas Bimbingan Mental Sosial dan Materi**

1. Dra. Hj. Nurhidaya ( Kementerian Agama Kabupaten Nunukan);
2. Yuanita Oping,S.H (Kementerian Agama Kab. Nunukan).

• **Instruktuk Keterampilan**

1. Instruktur Cake dari Kabupaten Nunukan Menyampaikan materi dan Praktek Keterampilan



Gambar 4.39. Bimbingan dan Rehabilitasi WTS di Kab. Nunukan (Sumber: Dokumentasi Panitia )



Gambar 4.40. Bimbingan dan Rehabilitasi WTS di Kab.  
Nunukan (Sumber: Dokumentasi Panitia )



Gambar 4.41. Bimbingan dan Rehabilitasi WTS di Kab.  
Nunukan (Sumber: Dokumentasi Panitia )





Gambar 4.42. Bimbingan dan Rehabilitasi WTS di Kab. Nunukan (Sumber: Dokumentasi Panitia )

#### 4. **One Day For Children (ODFC)**

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Kapasitas Pemerintah dengan berbagai pemenuhan kebutuhan pembangunan sangatlah terbatas, oleh karenanya peran serta masyarakat, dunia usaha dan mitra kerja Pemerintah sangat diperlukan dalam membantu dan menunjang keberhasilan penyelenggaraan Kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam pasal 38 Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial yang berbunyi masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Salah satu Program penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak yaitu dengan menyelenggaraan kegiatan One Day For Children (ODFC). Kegiatan yang didanai oleh Dana APBN ini memiliki agenda strategis dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan partisipasi stakeholder dan masyarakat dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak maka Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan kegiatan One Day For Children untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak yang tidak mampu/ miskin dan rentan untuk mengikuti kegiatan One Day For Children (ODFC) dengan penuh keceriaan dan dapat mengaktualisasikan potensi dan kreativitasnya secara mandiri.



One Day For Children (ODFC) merupakan hari yang sepenuhnya menjadi milik anak Indonesia, baik yang berada di dalam Negeri maupun di Luar Negeri. Sehingga setiap anak Indonesia memiliki kesempatan seluas- luasnya untuk mengungkapkan diri dalam berbagai kegiatan positif. Kegiatan One Day For Children pada hakekatnya merupakan momentum yang penting untuk menggugah kepedulian maupun partisipasi seluruh Rakyat Indonesia dalam menghormati dan menjamin hak- hak anak tanpa membedakan (diskriminasi), memberikan yang terbaik bagi anak, menjamin semaksimal mungkin kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta menghargai hak- hak anak.

Tujuan Penyelenggaraan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan kesempatan bagi anak Indonesia termasuk didalamnya anak yang termarjinalkan untuk mengaktualisasikan potensi dan kreatifitasnya dengan penuhkeceriaan dan mandiri serta menjadikan mereka sebagai tamu kehormatan.
- b. Mengarusutamakan hak anak dalam setiap aspek kehidupan sosial mulai dari tingkat keluarga, masyarakat termasuk dalam penyelenggaraan tata kehidupan berbangsa dan bernegara.
- c. Menumbuhkan Kepeduliaan, Kesadaran dan peran aktif masyarakat dan stakeholder dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak.

• **Tempat/waktu pelaksanaan kegiatan**

Pelaksanaan Kegiatan One Day For Children Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 dilaksanakan selama 1 (Satu) hari :

Hari : Jumat  
Tanggal : 09 November 2018  
Waktu : 08.00 Pagi - Selesai



Tempat : Ruang Pertemuan Gedung Gadis Provinsi Kalimantan Utara Lantai II, Jalan Rambutan Tanjung Selor

• **Peserta Kegiatan**

Adapun Peserta Kegiatan One Day For Children (ODFC) terdiri dari 200 anak dari 20 TK Paud yang tidak mampu/ miskin.

Adapun daftar peserta dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

Tabel. 4.12 Daftar Peserta One Day For Children (ODFC)

No	Nama Anak	Instansi	Nama Pendamping/ Yang Mewakili
1	Asmiranda amelia	SDN 013 TANJUNG SELOR	SEPTI ALBERT RUMENGAN, S.Pd,SD
2	Nuraini		
3	Cahaya hijrah		
4	Moh. Syahrul fadil ramadhan		
5	Rafka rahmat maulana		
6	Rafiza nabilla		
7	M. Raffi hairianto		
8	M. Nofal al hafizd		
9	M. Ikhsan		
10	Rafa'i		
11	Nurul indri aprillia gishela		
12	Sesar azzahrh nasrun		
13	Bella kurnia		
14	Memey bunga cantika		
15	Nur hafija		
16	Ratna		
17	M. Jefry		
18	M. Sajim		
19	Hana qanitah sabrina	SDN 003 TANJUNG	KAMARIAH, S.Pd
20	Raisa aldila ramadhani		



21	Adellia afiqa ramayansyah	SELOR	
22	Aprillya nur syalomitha ngion		
23	Nurul asyiva nadira		
24	Aurellia najwa mahajani		
25	Usmi kalsum		
26	Luthfatul ana		
27	Nur fathiyah		
28	Della novitasari		
29	Rahmat Ramadhan		
30	M. Rusda		
31	Amaliah syaikah darmawan		
32	Amany mutmainah adinda belqies		
33	Indah lestari		
34	Syaqila salmah		
35	Jihan nur arafah		
36	Wanda ika saputri		
37	M. Rifqi aditya. R		
38	Silva agustin		
39	Hafizah		
40	Rizki Ramadhan		
41	M. Ilham maulana		
42	Siti halifah		
43	Hetirus endah		
44	Syahputra		
45	Rendi bahari		
46	Rifai	SDN 001 TANJUNG PALAS	ENNI HERIANI, S.Pd
47	M. Ilham		
48	Miftah hanifah		
49	Tasya aulia fitri		
50	Viwidya prastiwi		
51	Syahrul anugrah		
52	Ferly rabianatha		
53	M. Saleh		
54	Najariah		
55	Yunus al kholifatul habiballah		
56	Riski aditiya		
57	Yuyut prastya		
58	Cinta		
59	M.darjun ayyub		
60	Bintang mustika putri		
61	M.fahri ramadhan		
62	Regina pratiwi		
63	Nurlaila		



64	Firmansyah		
65	Maulana amir mukmininin		
66	Nur sa'adah salimah		
67	Melody fariyani		
68	Nurfadila		
69	Muhammad nur akbar		
70	Laili rahmawati		
71	Qorida humaira		
72	Nabarie habibie		
73	Diyah Uliya		
74	Aluna		
75	Nur Aisyah		
76	Citra		
77	Rahmat Akbar		
78	Rizqi		
79	Rivan		
80	Viola Febiola		
81	Nur Sa;Diah Alda		
82	Nur Asmira		
83	Putra		
84	Rohid		
85	Selvi Indri Ramadani		
86	Rojwa Gina Anabila		
87	Novita Liana		
88	Gusti M. Fahri		
89	Wahyudi Saputra		
90	M. Haidir		
91	Amanda Atusyifa		
92	Putri Dhea Natasya		
93	Rezza okta viansyah		
94	Revansyah		
95	Risky al jihad		
96	Anisa		
97	Rafy nurramadhan suparlin		
98	Alpian aldi		
99	Muhammad dani		
100	Alnadia khaira		
101	Jumiati		
102	Radiansyah		
103	Ferriansyah		
104	Zul hilmi akbar		
105	Rio saputra		
106	Aprilio raitya wahri		
		SDN 007 TANJUNG SELOR	Hj. Dahlia,S.Pd.SD
		SDN 010 TANJUNG PALAS	KOMARIA



Tahun 2018

107	Mas ayu saparina		
108	Fajariana		
109	Gilang		
110	Ahmad ablan ramadhan.s		
111	Fitria Sulistianita	SDN 013 TANJUNG PALAS	NORA RAHMAYANTI,S.Pd.SD
112	Exel Marvino		
113	Yudia Chelsilia Vega		
114	Yemi Manustina		
115	Steven		
116	Andika Hitory		
117	Villa Yudin Tusau		
118	Reptia Luli		
119	Dicky Pranata		
120	Riehedy Gusthon		
121	Yuliyus Ligun		
122	Devi Agriviola		
123	Juari		
124	Alena		
125	Desi Natalia	SDN 007 TANJUNG PALAS	USMAN TALIB, S.Pd.SD
126	Delly Natalita		
127	Grendy		
128	Molinda		
129	Balqis Sabrina Lestari		
130	Muhammad Nur Irsyad		
131	Nur Azizah Askar		
132	Riski Maulana		
133	Wahyu Saputra Idris		
134	Annisa		
135	ArifFahri Ramadhan		
136	Cinta Aura Kasih Putri		
137	Raffi Achmad Fahrezi		
138	Raihanah Janeeta		
139	Oldiansyah	SDN 005 TANJUNG SELOR	ETA ASA, S.Pd.K
140	Andika Ramadani		
141	Azizah		
142	Ibnu Ramadhan Putra		
143	Kumala Sari		
144	Muhammad Iqbal		
145	Siti Nurkholizah		
146	Ratna Puspita Sari		
147	Dea Nur Oktavia		
148	Libra Aqillah		
149	Lion Adrian Thiodorus		



150	Maycel Pazzino Hang		
151	Quinissa Emanuela		
152	Shafa Aprilia		
153	Siti Fatimah		
154	Yohana Emanuela Bowa		
155	Juariely Santhy Putri		
156	Nilam Zalzalalah	Yayasan Karya Murni	
157	Pricilia Grosevenia		
158	Putri Ayu Ramadhani		
159	Deavaren		
160	Sellya Betran Philipus		
161	Ceysilameliani Awumbas		
162	Helsa Vania Kahimpong		
163	Luna Cristin Oktavia Lukas		
164	Timotius		
165	Denianus Senda		
166	Andi Maulana		
167	Meisyah Bernadetta		
168	Arjuna		
169	Yohanes Kelli Dulle		
170	Karina Jocelyn Tan		
171	Agustianus Wawansari		
172	Tibnu Abas		
173	Fajar Putra Septiawan		
174	Kefin Angga Firanata		
175	Hayqil Juliansyah		
176	Muthmainnah		
177	Fitri		
178	Ghina		
179	Atika		
180	Adzimah		
181	Azizah		
182	Itsni		
183	Nella		
184	Hikmah		
185	Naura		
186	Rifda		
187	Ridwan		
188	Ridho		
189	Intan		
190	Akbar		
191	Nawaf		
192	Indah		

- **Narasumber**

1. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara.
2. Dinas Pendidikan Kab.Bulungan.

- **Materi**

Materi One Day For Children ( Provinsi Kalimantan Utara khususnya Bidang Rehsos Tahun 2018 meliputi :

1. Materi Sambutan Gubernur Kalimantan Utara
2. Materi Senam dan Tari.



Gambar 4.43 One Day For Children (ODFC)  
(Sumber: Dokumentasi Panitia )



Gambar 4.44 One Day For Children (ODFC)  
(Sumber: Dokumentasi Panitia )



Gambar 4.45. One Day For Children (ODFC)  
(Sumber: Dokumentasi Panitia )





Gambar 4.46 One Day For Children (ODFC)

(Sumber: Dokumentasi Panitia )



5. **Asistensi Penyandang Disabilitas Berat**

a. **Alat Bantu Fisik bagi Penyandang Disabilitas Berat**

Tabel 4. 14 Daftar Nama Penerima Alat Bantu Fisik bagi Penyandang Disabilitas Berat

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Alamat</b>	<b>Alat Bantu</b>
1	Murni	Jl.Cendawan Gang Tunas Rt.005 Desa Selumit Pantai Kota Tarakan	Kursi Roda Dewasa
2	Ida Rohayani	Selumit Pantai Rt 016/Rw 004 Desa Selumit Pantai Kota Tarakan	Kursi Roda Dewasa
3	Muhammad Ridwan	Jl.Melati Rt.022 Karang Anyar Tarakan Barat Kota	Tongkat Lipat
4	Hadijah Salim	Jl.Kusuma Bangsa Rt.027 Kota Tarakan	Kruk Ketiak
5	Abdul Gani	Tanjung Rumbia Rt.018/Rw.007 Tanjung Selor Hulu Kabupaten Bulungan	Kruk Ketiak
6	Sukiran	Rt.012 Rw.003 Desa Panca Agung Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan	Kruk Ketiak
7	Arief Budiman	Jl.H.Maskur Rt.007/Rw.003 Kabupaten Bulungan	Tongkat Kaki Empat
8	Brigitta Raya	Jl.Pitan Aji No.20 Rt.001 Desa Terindak Kabupaten Bulungan	Kruk Ketiak Anak
9	Jaenah	Karang Agung, Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan	Kursi Roda Dewasa
10	Parni	Rt.011 Rw.003 Desa Panca Agung Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan	Kursi Roda Dewasa
11	Awal Rizky		Kursi Roda Dewasa
12	Pasri	Rt.003 Rw.001 Desa Panca Agung Kecamatan	Kursi Roda



		Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan	Dewasa
13	Bertolomius Lian Jangau	Sungai Urang Rt.010 Kelurahan Tanjung Palas Hilir Kabupaten Bulungan	Kursi Roda Dewasa
14	Nursah	Mara Hilir Rt.004 Desa Mara Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan	Kursi Roda Dewasa
15	Nindi Aresmi.S.A	Jl.Binjai Rt.006, Desa Pimping, Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan	Kursi Roda Anak
16	Ozam Kayang	Pimping Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan	Tongkat Kaki Satu
17	Kadir	Pimping Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan	Tongkat Kaki Satu
18	Nyian	Pimping Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan	Tongkat Kaki Satu
19	Pitriani	Rt 01 Desa Maning Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung	Kursi Roda Dewasa
20	Siti Alzedah	Desa Buong Baru Rt 001 Kecamatan Betayau Kabupaten Tanah Tidung	Kursi Roda Dewasa
21	Nur Fatihah	Seludau Rt 02 Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung	Kursi Roda Dewasa
22	Jamaluddin	Sesayap Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung	Kursi Roda Dewasa
23	M.Ridwan	Jl.Kebun Sayur Rt.04 Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung	Kursi Roda Dewasa
24	Nuriyah	Tideng Pale Timur Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung	Kursi Roda Dewasa
25	Nurlaili Sahnova	Jl.Jend.Sudirman Rt.04 Rw.02 Tideng Pale Kec. Sesayap Kabupaten Tana Tidung	Kursi Roda Anak
26	Azmi Shidqi	Jl.Tanah Abang Rt.004 Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung	Kursi Roda Anak



27	Muhammad Amin	Jl.Tien Suharto Rt.013 Kel.Nunukan Timur Kabupaten Nunukan	Tongkat Kaki Empat
28	Aliya Arifin	Jl.Jamaker Rt.026 Kel.Nunukan Barat Kabupaten Nunukan	Tongkat Kaki Empat
29	Ardiman	Gang Delima Rt.020 Kel.Nunukan Timur	Kursi Roda Anak
30	Imelda Alba	Jl.Pongtiku Rt.016 Kel.Nunukan Tengah Kabupaten Nunukan	Kruk Ketiak Anak
31	Fina Aprilia L	Jl.Iskandar Muda Rt.013 Kel.Nunukan Barat Kabupaten Nunukan	Kruk Ketiak Anak
32	Kamsih	Jl.Ujang Dewa Rt.005 Rw.001 Desa Nunukan Selatan kabupaten Nunukan	Kruk Ketiak Anak
33	Hasnah	Jl.Ujang Dewa Rt.005 Rw.001 Desa Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan	Tongkat Kaki Satu
34	Udang Lawai	Desa Long Loreh Rt.001 Kabupaten Malinau	Kursi Roda Dewasa
35	Murang Kelit	Respen Tubu Rt.003 Kabupaten Malinau	Kursi Roda Dewasa
36	Ani	Rt.001 Desa Batu Kajang Kecamatan Malinau Selatan Hilir Kabupaten Malinau	Kursi Roda Dewasa
37	Rita D	Desa Long Gafid Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau	Kursi Roda Dewasa
38	Libung Silut	Rt.1 Desa Naha Kramo Baru, Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kabupaten Malinau	Kursi Roda Dewasa
39	Yohanes	Batu Lidung Rt.004 Kabupaten Malinau	Kursi Roda Dewasa
40	Yakup	Respen Tubu Rt.004 Kabupaten Malinau	Kruk Ketiak
41	Husen	Malinau Kota Rt.020 Kabupaten Malinau	Kruk Ketiak



42	Wendri	Batu Lidung Rt.004 Kabupaten Malinau	Kruk Ketiak
43	Lidia Fraid	Tanjung Lapang Rt.003 Kabupaten Malinau	Kruk Ketiak
44	Herman	Tanjung Lapang Rt.003 Kabupaten Malinau	Kruk Ketiak



Gambar 4. 45. Penerima Alat Bantu Disabilitas  
(Sumber : Dokumentasi Panitia)



Gambar 4. 46. Penerima Alat Bantu Disabilitas  
(Sumber : Dokumentasi Panitia)



Gambar 4. 47. Penerima Alat Bantu Disabilitas  
(Sumber : Dokumentasi Panitia)



Gambar 4. 48. Penerima Alat Bantu Disabilitas  
(Sumber : Dokumentasi Panitia)



Gambar 4. 49. Penerima Alat Bantu Disabilitas  
(Sumber : Dokumentasi Panitia)



Gambar 4.50 Penerima Alat Bantu Disabilitas  
(Sumber : Dokumentasi Panitia)



Gambar 4.51 Penerima Alat Bantu Disabilitas  
(Sumber : Dokumentasi Panitia)



Gambar 4.52 Penerima Alat Bantu Disabilitas  
(Sumber : Dokumentasi Panitia)



Gambar 4.53 Penerima Alat Bantu Disabilitas  
(Sumber : Dokumentasi Panitia)



Gambar 4.54 Penerima Alat Bantu Disabilitas  
(Sumber : Dokumentasi Panitia)

**c. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial**

**1. Pemberian Insentif Tagana**

Pembayaran Insentif Tagana yang didanai oleh APBN sebanyak 142 orang @ Rp 250.000/Bulan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.15 Penerima Insentif Tagana APBN

<b>No.</b>	<b>N a m a</b>	<b>Tahun Rekrutme n</b>	<b>Asal Kabupaten /Kota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Rismanto. S	2007	Bulungan
2	Pelda (Pur) Sapar	2007	Bulungan
3	Uleh Agang	2007	Bulungan
4	Zubair, S.Pd	2007	Bulungan
5	Iskandar, SE	2007	Bulungan
6	Alimuddin, S.Sos	2007	Bulungan
7	Jusmiadi	2007	Bulungan
8	Robby Oktapian	2007	Bulungan
9	Eli Khusnaeni, SE	2007	Bulungan
10	Anida Andrianie, S.Pd	2007	Bulungan
11	Sri Pranggono. K, SHI	2007	Bulungan
12	Bambang Rudiono, S.Pd	2007	Bulungan
13	Budi Syamsudin	2007	Bulungan
14	Sopan Sopian, A.Md	2007	Bulungan
15	Ahmad Syahroni	2007	Bulungan
16	M. Donny Halim	2008	Bulungan
17	Aguines	2008	Bulungan
18	M. Haryanto	2008	Bulungan



Tahun 2018

19	Irma Lutfy Farlyna, SP	2008	Bulungan
20	Jusman. S	2008	Bulungan
21	Muzakkar	2008	Bulungan
22	Wawan ( Taswan )	2008	Bulungan
23	Ismail Bin Idrus	2008	Bulungan
24	Rina Lesmana, SP.,MM	2008	Bulungan
25	Hendra Wahyudi	2008	Bulungan
26	Jainiansyah	2008	Bulungan
27	Reni Ingan	2008	Bulungan
28	Andi Nursamsul	2008	Bulungan
29	Hendryk L. Sigara, S.Sos	2011	Bulungan
30	Amrullah, S.Sos	2011	Bulungan
31	Sunardi	2011	Bulungan
32	M. Ali Usman	2011	Bulungan
33	Ferry Pardiansyah, SE	2011	Bulungan
34	Asep Suriyatman	2011	Bulungan
35	Jumaansyah	2011	Bulungan
36	Suardi	2011	Bulungan
37	Endar Kurniawan	2011	Bulungan
38	Agustinus Aka	2011	Bulungan
39	W. Setia Wardhana	2011	Bulungan
40	Naharuddin	2011	Bulungan
41	Ayu Utami Hasyfaraini	2012	Bulungan
42	Jul Akbar, S.Sos	2012	Bulungan
43	Rita Nurlela	2012	Bulungan
44	M. Robiansyah / Robitus	2012	Bulungan



Tahun 2018

45	Indri Widiastuty, A.Md,Kep	2012	Bulungan
46	Meylisa Harjanti	2012	Bulungan
47	Lidya Agustina	2012	Bulungan
48	Yahya Iskandar	2012	Bulungan
49	Kuleh Sulaiman	2012	Bulungan
50	Sulyanto	2012	Bulungan
51	Sudirman, S.Ag	2013	Bulungan
52	Wahdaniansyah, S.Sos	2013	Bulungan
53	Edy Susanto	2013	Bulungan
54	Asri	2013	Bulungan
55	Raudhatul Munawwarah	2013	Bulungan
56	Mardiana	2013	Bulungan
57	Haryati	2013	Bulungan
58	Budimansyah	2013	Bulungan
59	Rafidin, S.Sos	2014	Bulungan
60	Arbain	2014	Bulungan
61	Sondi Julianto, ST	2014	Bulungan
62	Dedy Hardiyanto, S.Pd	2014	Bulungan
63	Hanafiah Indra. IG	2014	Bulungan
64	Kasemin	2014	Bulungan
65	Eva Ratnasari	2014	Bulungan
66	Syahrudin	2014	Bulungan
67	Agustinus	2014	Bulungan
68	Kesnia Marthin	2014	Bulungan
69	Syahrullah	2014	Bulungan



Tahun 2018

70	Burhanudin (Aco)	2014	Bulungan
71	Yusak	2014	Bulungan
72	Dorkas Namsun	2014	Bulungan
73	Sugiyarto	2014	Bulungan
74	Abdul Latif	2014	Bulungan
75	Tri Baru Asih, S. Tr. Keb	2016	Bulungan
76	Dt. Mohd. Isa Ansari, SH	2016	Bulungan
77	Muhammad Zainuri	2016	Bulungan
78	Sugianto Sarijo	2016	Bulungan
79	Rudiansyah	2016	Bulungan
80	Muhammad Zendi Gazali	2016	Bulungan
81	Asdianto, SE	2016	Bulungan
82	Denny Rayfhian, SE	2016	Bulungan
83	Nanang Sopiensyah, SE	2016	Bulungan
84	Mashud, S. Sos	2016	Bulungan
85	Edy Warsito	2016	Bulungan
86	Andri Purnomo	2016	Bulungan
87	Jul Ba'da	2016	Bulungan
88	Aida Safriyanti	2016	Bulungan
89	Desy Rahma Dani	2016	Bulungan
90	Nurjanah, S. Kom	2016	Bulungan
91	Ajianto	2016	NUNUKAN
92	Andi Arman	2016	NUNUKAN
93	Samsul	2016	NUNUKAN
94	Hery Marsudiyono	2016	NUNUKAN
95	Slamet Budi Santoso, SH	2016	NUNUKAN



Tahun 2018

96	Nurdianti, SE	2016	NUNUKAN
97	Nur Eka	2016	NUNUKAN
98	Eva Wahyuni, SE	2016	NUNUKAN
99	Hasmiyati,S.Pd.I	2016	NUNUKAN
100	Moh. Delvian NM, S.Sos	2016	NUNUKAN
101	Fadli	2016	KTT
102	Ade Yunita Mayasari	2016	KTT
103	Patti Nurul Hidayah	2016	KTT
104	Muhammad Yusuf	2016	KTT
105	Ronie Selamat	2016	KTT
106	Wahaf	2016	KTT
107	Ronny Efendy, S.Pd	2016	KTT
108	Shilton	2016	Malinau
109	Midun	2016	Malinau
110	Alan Rudi Kusuma	2016	Malinau
111	Titus, SE	2016	Malinau
112	Juarmanto	2016	Malinau
113	Dina Maryana, SE	2014	Tarakan
114	Ardiansyah	2014	Tarakan
115	Aidil Febriyan	2016	Tarakan
116	Isnain Ramadhan, A	2014	Tarakan
117	Novi Yolanda Risnandea	2016	Tarakan
118	Agus Raharjo, S.Ip	2014	Tarakan
119	Kuswadi Jakaria S.I.Kom	2016	Tarakan
120	Adnan Buyung	2014	Tarakan
121	Hermansyah, SE	2014	Tarakan



Tahun 2018

122	Aulianegara, S.H	2014	Tarakan
123	M.Fahrul Faiturrahman	2015	Tarakan
124	Irfan. M, SE	2014	Tarakan
125	Indra Ferdiansyah	2016	Tarakan
126	Muzakkir, SE	2014	Tarakan
127	Baharuddin	2014	Tarakan
128	Muhammad Haidir	2014	Tarakan
129	Fauzan Wahyudi, SE	2014	Tarakan
130	Yudi Heksawan	2014	Tarakan
131	Darmawan	2014	Tarakan
132	Syahrianto	2014	Tarakan
133	Muhammad Yusuf	2014	Tarakan
134	Firda Putri Ani, SE	2014	Tarakan
135	Feby Mulyani, SE	2014	Tarakan
136	Billy Ocean Tabang	2014	Tarakan
137	Teguh Adi Yatma	2014	Tarakan
138	Adi Wibowo	2014	Tarakan
139	Herlinda	2014	Tarakan
140	Ardiansyah	2014	Tarakan
141	Nuraliansyah	2014	Tarakan
142	Abdul Munir	2014	Tarakan

## 2. Pemberian Tali Asih TKSK

Pemberian Tali Asih TKSK yang didanai oleh APBN sebanyak 55 TKSK se-Kalimantan Utara dengan besaran masing-masing Rp. 500.000/Bulan.

Tabel 4.16 Penerima Insentif Tagana APBN



<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>No Rekening</b>	<b>Bank</b>
01	Berahim	0092715493	Bank Kaltimtura
02	Armansyah,S.Sos	1742000547	Bank Kaltimtura
03	Suharjo	0092116719	Bank Kaltimtura
04	Syahrudin, SH	1072050327	Bank Kaltimtura
05	Rasdiana	1077037604	Bank Kaltimtura
06	Muddar	0097205931	Bank Kaltimtura
07	Paskalis	0092159710	Bank Kaltimtura
08	Muh. Ramadan, A.Md	1602017326	Bank Kaltimtura
09	Ari Rahman Ananda, SE	122406083	Bank Kaltimtura
10	Fini Lily	122300277	Bank Kaltimtura
11	Dewi Nova Vristina	122501701	Bank Kaltimtura
12	Patria, A. Md	122915450	Bank Kaltimtura
13	Jekson, S. Sos	0122914577	Bank Kaltimtura
14	Kahang, S.Sos	0122227448	Bank Kaltimtura
15	Hermansyah	1162052442	Bank Kaltimtura
16	Dina Suryana Pratama Sari	0052429862	Bank Kaltimtura
17	Ardiansyah	1202026041	Bank Kaltimtura
18	M. Fahrul Faiturrahman	1162048216	Bank Kaltimtura
19	Mohamad Hamzah, S.Sos	0072255771	Bank Kaltimtura
20	Hendra Wahyudi	1372016163	Bank Kaltimtura
21	Jul Akbar, S.Sos	1692010155	Bank Kaltimtura
22	Endar Kurniawan	1622002490	Bank Kaltimtura
23	Jainiansyah	1628001550	Bank Kaltimtura
24	Hariyadi	1692006379	Bank Kaltimtura
25	Suardi	1692003311	Bank Kaltimtura
26	Naharuddin	72203551	Bank Kaltimtura
27	Jaimah, Z	0072223730	Bank Kaltimtura
28	Jainah Aprilliani, S.Pi	1637000302	Bank Kaltimtura



29	Rina Susilawati	0147034661	Bank Kaltimtara
30	Ridwan	0142053519	Bank Kaltimtara
31	Sungkowo	0142067058	Bank Kaltimtara
32	Chaerul Bahri	164401000936535	BRI
33	Saharuddin	459701012055537	BRI
34	Indra Bangsawan	789801003638533	BRI
35	Susana Tiku Mairi., A.Md	361501002166509	BRI
36	Margareta, A. Md	224601000878502	BRI
37	Roni Aldiki, SH	224601001829530	BRI
38	Abiah Daniel, SE	351501015777535	BRI
39	Samuel Surang, S.Sos	361501022848539	BRI
40	Rostiana, S.Sos	343601012902531	BRI
41	Arianthi Ajang, SE	361501023053535	BRI
42	Tugianto	343801024101537	BRI
43	Lenni Tambun ST	343801021346536	BRI
44	Sunardi	458801001875539	BRI
45	Muhamad Doni Halim	343801001282508	BRI
46	Irma Lutfy Farlyna,SP	343801026230536	BRI
47	Aguenes	458801011909530	BRI
48	Wahyuni Setiya Wardhana	030601015601502	BRI
49	Agutinus Aka	458901008792532	BRI
50	Reni Ingan	343801029047534	BRI
51	Anike Vesti	733701004050532	BRI
52	Yudi Ardiansyah, S.Pd	733701001260502	BRI
53	Ummi Wahdaniaah	018301008851536	BRI
54	Ruslan, SH	343801017180532	BRI
55	Rina Lesmana SP, MM	0252034544	BNI



## 2. Pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB)

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis

Penanggulangan Bencana adalah keseluruhan aspek perencanaan kebijakan pembangunan yang berisiko bencana yang meliputi pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang mencakup kegiatan sebelum, pada saat, dan setelah terjadinya bencana yang terdiri dari pencegahan bencana, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan kembali kondisi yang lebih baik sebagai akibat dampak bencana.

Kampung Siaga Bencana yang selanjutnya disebut KSB adalah wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan kawasan/tempat untuk program penanggulangan bencana.

KSB dibentuk dengan maksud untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman dan risiko bencana dengan cara menyelenggarakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam dan manusia yang ada pada lingkungan setempat.

Kegiatan Pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) dilaksanakan di Desa Mansalong, Kecamatan Lumbis Kab. Nunukan.

Narasumber Kegiatan Kampung Siaga Bencana (KSB) yakni :



1. Narasumber Kementerian Sosial RI berjumlah 1 orang;
2. Narasumber Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara berjumlah 1 (satu) orang;
3. Narasumber Dinas Sosial Kab. Nunukan berjumlah 1 (satu) orang;
4. Praktisi berjumlah 5 orang, yang berasal dari FK TAGANA Prov.Kaltara

Pada dasarnya kegiatan Kampung Siaga Bencana menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Artinya kesiapsiagaan masyarakat menjadi pokok kegiatan Kampung Siaga Bencana. Karena dengan kesiapsiagaan masyarakat dapat merencanakan suatu tindakan untuk mengurangi akibat suatu bencana. Namun demikian bencana memiliki sifat tidak terduga (unpredictable) sehingga kesiapsiagaan saja belum cukup. Tim Kampung Siaga Bencana penting untuk mempersiapkan kegiatan baik sebelum bencana, pada saat dan paska bencana, sebagai bagian tak terpisahkan antar tahap satu dengan tahap lainnya.

Kegiatan sebelum bencana berfokus pada pengenalan potensi dan sumberdaya yang ada pada masyarakat, ancaman dan risiko bencana yang mungkin timbul akibat suatu peristiwa bencana serta mempersiapkan masyarakat sewaktu-waktu terjadi bencana (kesiapsiagaan). Kesiapsiagaan masyarakat sebelum bencana sangat penting dilakukan, mengingat bencana dapat terjadi sewaktu-waktu tanpa tahu waktunya.

Pada saat terjadi bencana tindakan Tim Kampung Siaga Bencana berfokus pada pemberian pertolongan langsung kepada korban bencana yaitu mempraktekkan apa yang sudah disusun sebelum bencana. Ketua Tim Kampung



Siaga Bencana memutuskan apakah warga desa mengungsi atau tidak dan kemudian apabila meminta pertolongan siapa yang harus dihubungi.

Pasca bencana berkaitan erat dengan kegiatan pemulihan, sebaiknya Pengurus dan Anggota KSB secara rutin mengadakan pertemuan dengan anggota masyarakat lainnya untuk mengetahui kebutuhan dan cara pemulihan terhadap dampak bencana.

Pertemuan ini bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan antara Tim KSB dan Anggota masyarakat yang terkena bencana tentang bagaimana masa pemulihan untuk lingkungannya. Apakah perlu adanya dibentuk Tim/ Seksi untuk membuat analisa kebutuhan.

Kampung Siaga Bencana dibentuk dan dilaksanakan di seluruh Indonesia, disetiap wilayah memiliki karakteristik dan keunikan yang berbeda-beda. Untuk itu perlu adanya suatu panduan dan syarat yang jelas dan mudah dipahami. Secara umum mekanisme pembentukan dibagi dalam tiga tahap kegiatan yaitu pra pembentukan, pembentukan dan pasca pembentukan.

Kegiatan pra pembentukan merupakan kegiatan penyebaran informasi pada tingkat pembuat kebijakan (provinsi) dan para pihak yang memiliki kepentingan dalam penanggulangan bencana. Misalnya BPPD, BMKG, Dinas Pekerjaan Umum dan sebagainya. Dalam pra pembentukan ini terdapat beberapa hal penting untuk dibahas menyangkut hal-hal penting berikut ini :

- a) Sosialisasi pentingnya penanggulangan bencana dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- b) Identifikasi dan inventarisasi potensi dan sumber daya yang ada;



- c) Pengenalan berbagai ancaman yang menimbulkan bencana;
- d) Persiapan penetapan lokasi.

Pembentukan:

- a) Penyuluhan atau penyebaran informasi kepada 100-150 orang masyarakat yang peduli terhadap masalah kebencanaan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan Tim KSB yang berjumlah 30-60 orang yang benar-benar kompak dan solid. Karena Tim KSB ini dimasa mendatang menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan KSB;
- b) Pelatihan Penanggulangan Bencana. Dalam pelatihan ini disampaikan hal-hal umum berkaitan dengan penanggulangan bencana. Pelatihan ini melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dengan kegiatan penanggulangan di daerah masing-masing;
- c) Kegiatan Simulasi. Simulasi yaitu melibatkan masyarakat yang telah mendapatkan penyuluhan minimal berjumlah 100 orang di lapangan terbuka. Tujuannya adalah mempraktekkan/ memperagakan pengetahuan bencana sekaligus bagaimana tindakan saat terjadi bencana. Simulasi penanggulangan bencana difasilitasi oleh Taruna Siaga Bencana (TAGANA).

Pihak-pihak yang memiliki kewenangan dapat melakukan pemantauan secara berkala. Aspek-aspek yang dipantau dalam KSB seperti :

- a) Gardu Sosial dan kelengkapannya (direktori);
- b) Lumbung Sosial Penanggulangan Bencana dan Isinya;



c) Kegiatan KSB lain yang mendukung penanggulangan bencana.

Pembiayaan kegiatan KSB ditekankan pada kemandirian masyarakat. Adapun Pemerintah Pusat dan Daerah memfasilitasi tahap awal pembentukan. Selanjutnya kegiatan KSB pendanaan bersumber dari swadaya masyarakat. Misalnya melalui iuran bulanan, sumbangan dari Perusahaan, atau sumbangan dari hibah pihak tertentu yang peduli masalah kebencanaan.

Sesuai dengan prinsip KSB maka semua kegiatan kegiatan KSB harus dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dan transparan baik kepada masyarakat maupun pemerintah dan pihak lain yang membutuhkan.

Pengukuran keberhasilan Kampung Siaga Bencana dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara berkala melalui kegiatan evaluasi yang melibatkan tim dari berbagai pihak. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memotivasi Tim KSB menjalankan Kampung Siaga Bencana secara benar dan tepat. Beberapa hal yang dievaluasi adalah sebagai berikut : Direktori Penanggulangan Bencana, Standar Operasional Prosedur, Gardu Sosial, Lumbung Sosial Penanggulangan Bencana dan isinya, Tenaga Terlatih Dalam Penanggulangan Bencana, Pemutakhiran data potensi dan sumber alam yang terkait dengan penanggulangan bencana, dan Pemutakhiran data demografi.

- **Tahapan Pelaksanaan Kegiatan**

Kampung Siaga Bencana (KSB) Desa Mansalong, Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan dan meliputi 4 tahap kegiatan, yakni : Survey Penjajagan

Lokasi, Kegiatan Penyuluhan, Kegiatan Latihan dan Kegiatan Simulasi.

#### **A. Survey Penjajagan Lokasi**

Kegiatan survey penjajagan lokasi berfokus pada :

1. Pengenalan potensi dan sumber daya yang ada pada masyarakat;
2. Ancaman dan risiko bencana yang mungkin timbul akibat suatu peristiwa bencana;
3. Penyebaran informasi pada tingkat pembuat kebijakan (kecamatan dan desa) dan para pihak yang memiliki kepentingan dalam penanggulangan bencana.

Kegiatan ini dilaksanakan di Masalong pada tanggal 26 s/d 28 September 2018

#### **B. Kegiatan Penyuluhan**

Penyuluhan atau penyebaran informasi kepada 100 orang masyarakat yang peduli terhadap masalah kebencanaan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan Tim KSB yang berjumlah 60 orang yang benar-benar kompak dan solid. Karena Tim KSB ini dimasa mendatang menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan KSB.

Materi penyuluhan Kampung Siaga Bencana (KSB), yaitu :

1. Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Penanggulangan Bencana.
2. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Bencana.



3. Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana.
4. Model Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat.
5. Penyusunan Road Map Directory dan SOP Penanggulangan Bencana

Kegiatan ini dilaksanakan di Mansalong pada tanggal 13 November 2018.

### **C. Kegiatan Latihan**

Dalam pelatihan ini disampaikan hal-hal umum berkaitan dengan penanggulangan bencana. Pelatihan ini melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dengan kegiatan penanggulangan bencana.

Materi Latihan Kampung Siaga Bencana (KSB), yaitu :

1. Sistem Peringatan Dini Lokal.
2. Penyusunan Road Map Directory dan SOP Penanggulangan Bencana.
3. Teknik Pendataan dan Pelaporan Kejadian Bencana.
4. Penanganan Pengungsi dan Dapur Umum Lapangan.

Kegiatan ini dilaksanakan di Mansalong pada tanggal 14 November 2018.

### **D. Kegiatan Simulasi**

Simulasi yaitu melibatkan masyarakat yang telah mendapatkan penyuluhan berjumlah 250 orang di lapangan terbuka. Tujuannya adalah mempraktekkan/ memperagakan pengetahuan



bencana sekaligus bagaimana tindakan saat terjadi bencana. Simulasi penanggulangan bencana difasilitasi oleh Taruna Siaga Bencana (TAGANA).

Kegiatan ini dilaksanakan di Mansalong pada hari Kamis tanggal 15 November 2018

#### **E. Keanggotaan Tim**

Tim KSB terdiri dari pengurus dan anggota. Pengurus KSB terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta dibantu paling sedikit oleh 4 (empat) bagian yang terdiri atas :

- 1) Bagian Evakuasi
- 2) Bagian Dapur Umum
- 3) Bagian Logistik
- 4) Bagian Hunian Sementara

Pengurus KSB terdiri dari unsur masyarakat dan/ atau TAGANA. Jangka waktu kepengurusan KSB selama 3 (tiga) tahun untuk selanjutnya dapat dipilih kembali.

Pengurus KSB mempunyai tugas :

- 1) Merencanakan dan menyusun kegiatan kerja;
- 2) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan;
- 3) Menyampaikan laporan pelaksanaan KSB setiap tahun kepada Dinas/ Instansi Sosial atau kementerian sosial;
- 4) Melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.

Keanggotaan Tim KSB berjumlah 30 (tiga puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) orang yang berasal dari masyarakat. Keanggotan tim KSB harus memenuhi syarat :



- 1) Bersifat sukarela;
- 2) telah mengikuti pelatihan penanggulangan bencana atau sejenis yang dilaksanakan oleh Dinas/ Instansi Sosial Kabupaten/ Kota, Provinsi, atau Kementerian Sosial; dan
- 3) Bertempat tinggal di kawasan dimaksud.

Materi penyuluhan Kampung Siaga Bencana (KSB), yaitu :

1. Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Penanggulangan Bencana.
2. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Bencana.
3. Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana.
4. Model Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat.
5. Penyusunan Road Map Directory dan SOP Penanggulangan Bencana

Pembiayaan kegiatan KSB ditekankan pada kemandirian masyarakat. Adapun Pemerintah Pusat dan Daerah memfasilitasi tahap awal pembentukan. Selanjutnya kegiatan KSB pendanaan bersumber dari swadaya masyarakat. Misalnya melalui iuran bulanan, sumbangan dari Perusahaan, atau sumbangan dari hibah pihak tertentu yang peduli masalah kebencanaan.

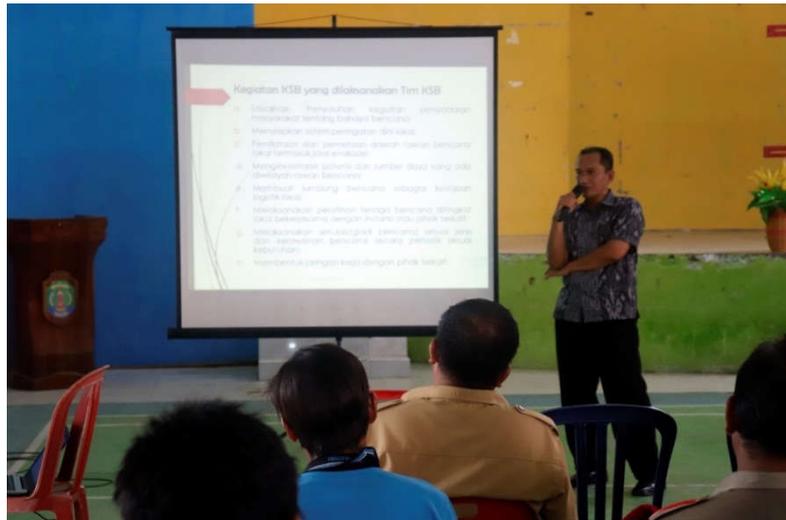
Sesuai dengan prinsip KSB maka semua kegiatan kegiatan KSB harus dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dan transparan baik kepada masyarakat maupun pemerintah dan pihak lain yang membutuhkan.

Pengukuran keberhasilan Kampung Siaga Bencana dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah

Daerah secara berkala melalui kegiatan evaluasi yang melibatkan tim dari berbagai pihak. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memotivasi Tim KSB menjalankan Kampung Siaga Bencana secara benar dan tepat. Beberapa hal yang dievaluasi adalah sebagai berikut: Direktori Penanggulangan Bencana, Standar Operasional Prosedur, Gardu Sosial, Lumbung Sosial Penanggulangan Bencana dan isinya, Tenaga Terlatih Dalam Penanggulangan Bencana, Pemutakhiran data potensi dan sumber alam yang terkait dengan penanggulangan bencana, dan Pemutakhiran data demografi.



Gambar 4. 55. Kegiatan Penyuluhan KSB di desa  
Mansalong  
(Sumber : Dokumentasi Panitia)



Gambar 4.56. Kegiatan Penyuluhan KSB Kegiatan  
Penyuluhan KSB di desa Mansalong  
(Sumber : Dokumentasi Panitia)



Gambar 4.57. Kegiatan Pelatihan KSB Kegiatan  
Penyuluhan KSB di desa Mansalong  
(Sumber : Dokumentasi Panitia)



Gambar 4.58. Kegiatan Pelatihan KSB Kegiatan Penyuluhan KSB di desa Mansalong  
(Sumber : Dokumentasi Panitia)



Gambar 4.59. Kegiatan Simulasi KSB Kegiatan Penyuluhan KSB di desa Mansalong  
(Sumber : Dokumentasi Panitia)



ambar 4.60. Kegiatan Simulasi KSB Kegiatan  
Penyuluhan KSB di desa Mansalong

*(Sumber : Dokumentasi)*



Gambar 4.61. Kegiatan Simulasi KSB Kegiatan  
Penyuluhan KSB di desa Mansalong

*(Sumber : Dokumentasi)*



Gambar 4.62. Kegiatan Simulasi KSB Kegiatan  
Penyuluhan KSB di desa Mansalong  
(Sumber : Dokumentasi)



Gambar 4.63. Kegiatan Penyuluhan KSB di desa Putat  
(Sumber : Dokumentasi)

#### d. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

##### 3. Bimtek TKSK

Untuk mendorong upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial sampai tingkat Kecamatan kearah yang lebih baik, maka Departemen Sosial memprakarsai terbentuknya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disebut TKSK sebagai



perwujudan partisipasi sosial masyarakat. TKSK merupakan pelaksana pendampingan sosial yang bisa menjembatani program Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menggerakkan masyarakat dan potensi kesejahteraan lainnya. Keberadaan TKSK juga dapat mendukung pelaksanaan pendekatan anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) yang membutuhkan pemetaan target sasaran sehingga diperlukan orang yang berada dilokasi sasaran Pemerintah Daerah dalam kaitan ini Dinas Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota diharapkan dapat membina dan mendayagunakan TKSK dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Untuk itu perlu dilakukan bimbingan teknis Untuk meningkatkan kualitas kinerja TKSK dalam melaksanakan tugas pelayanan dan penyelenggaraan kesejahteraan social, Agar TKSK dapat memahami ragam kegiatan pendampingan sosial yang perlu dilaksanakan Dan untuk mengetahui permasalahan apa saja yang terjadi didalam PMKS dan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut.

- **Tempat/waktu pelaksanaan kegiatan**

Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis TKSK dalam Penanganan PMKS Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 dilaksanakan selama 3 (Empat) hari terhitung mulai :

Hari : Senin - Rabu

Tanggal : 12-14 Maret 2018

Waktu : 12.00 - Selesai

Tempat : Hotel Grand Pangeran Khar Tanjung Selor

- **Peserta Kegiatan**

Peserta Bimbingan Teknis Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Provinsi Kalimantan Utara Tahun

2018 adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang berasal dari Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara dengan rincian sebagai berikut:

1. Kabupaten Bulungan sebanyak 6 orang
2. Kabupaten Malinau sebanyak 7 orang
3. Kabupaten Nunukan sebanyak 8 orang
4. Kota Tarakan sebanyak 4 orang
5. Kabupaten Tana Tidung sebanyak 2 orang

• **Narasumber**

1. Drs. H. Sugiono, M.Si (Kepala Dinas Sosial Prov. Kaltara);
2. Dra. Hj. Arsanah (Kepala Bidang Dayasos dan PFM Dinas Sosial Prov.Kaltara)
3. Drs. Timbul Sibarani, M.AP (Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintah BAPPEDA Prov. Kaltara)



Gambar 4.64. Dokumentasi kegiatan  
(Sumber: Dokumentasi Panitia)



Gambar 4.65. Dokumentasi kegiatan  
(Sumber: Dokumentasi Panitia)

#### 4. Bimtek PSM

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara PSM mempunyai posisi yang strategis bagi masa depan bangsa. Kemajuan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditentukan oleh kualitas PSM sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam mewujudkan aktualisasi ditengah tengah kehidupan masyarakat. Pengaruh budaya global akan mudah mengubah pola pikir, sikap dan prilaku para Pekerja sosial Masyarakat. Dengan kecanggihan teknologi informasi yang begitu mudah di akses jelas akan mempercepat proses akulturasi dikalangan Pekerja Sosial Masyarakat.

Keberadaan Pekerja Sosial Masyarakat dalam penanganan PMKS sangat diharapkan selain sebagai pendamping sosial bagi warga masyarakat juga dapat menginisiasi penanganan masalah sosial dan mendorong, mengerakkan serta mengembangkan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan harapan

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) menjadi bagian keberhasilan bangsa ini dalam meneruskan estafet pembangunan kesejahteraan sosial.

- Tempat/Waktu Pelaksanaan Kegiatan.

Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis PSM Dalam Penanganan PMKS Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 dilaksanakan selama 3 (Tiga) hari terhitung mulai :

Hari : Selasa s/d Kamis

Tanggal : 10/d 12 April 2018

Waktu : 12.00 Wite - Selesai

Tempat : Hotel Pangeran Khar Tanjung Selor

- Peserta Kegiatan

Peserta Bimbingan Teknis Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 adalah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang berasal dari Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara dengan rincian :

1. Kabupaten Bulungan sebanyak 10 orang;
2. Kabupaten Malinau 2 orang;
3. Kabupaten Nunukan sebanyak 4 orang ;
4. Kota Tarakan sebanyak 10 orang;
5. Kabupaten Tana Tidung sebanyak 4 orang.

- Narasumber

Narasumber berasal dari Kasubbid Kesejahteraan Rakyat BAPPEDA dan Litbang Prov. Kaltara sebanyak 1 (satu) Orang, dan dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 3 (tiga) orang.





Gambar 4.66. Dokumentasi kegiatan  
(Sumber: Dokumentasi Panitia)

#### **5. Bimtek Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)**

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) merupakan media konsultasi bagi individu dan keluarga yang mengalami masalah sosial psikologis dalam keluarganya, yang mengganggu pelaksanaan peran dan fungsinya sebagai pribadi, anggota keluarga, dan anggota kelompok sosial lainnya. Masalah psikologis keluarga dapat muncul dan berkembang dikarenakan kurangnya penanaman budi pekerti dan pengaruh berbagai budaya luar serta mudahnya mengakses secara bebas arus informasi yang berkaitan erat dengan perubahan pola sikap dan perilaku seseorang. Dalam perkembangannya, masalah yang ditangani LK3 antara lain masalah sosial psikologis, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perceraian, masalah ekonomi, anak terlantar, lanjut usia, narkoba dan masalah sosial lainnya, kesemuanya permasalahan ini dapat diselesaikan dengan merujuk ke lembaga yang relevan dalam menyelesaikan masalahnya.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara LK3 mempunyai posisi yang strategis bagi masa depan bangsa. Kemajuan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditentukan oleh kualitas LK3 sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam



melaksanakan tugas penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam mewujudkan aktualisasi ditengah tengah kehidupan masyarakat. Pengaruh budaya global akan mudah mengubah pola pikir, sikap dan perilaku Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3). Dengan kecanggihan teknologi informasi yang begitu mudah di akses jelas akan mempercepat proses akulturasi di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).

Keberadaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dalam penanganan PMKS sangat diharapkan selain sebagai pendamping sosial bagi warga masyarakat juga dapat menginisiasi penanganan masalah sosial dan mendorong, mengerakkan serta mengembangkan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan harapan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) menjadi bagian keberhasilan bangsa ini dalam meneruskan estafet pembangunan kesejahteraan sosial.

Dimasa sekarang tidak ada satu pun unsur dalam kehidupan berbangsa yang tidak berubah dan bisa terlepas dari pengaruh lingkungan disekitarnya. LK3 sebagai sebuah wadah suka atau tidak suka akan menghadapi perubahan, oleh karena itu perlu kreativitas dan motivasi dalam merumuskan dan melakukan berbagai program programnya.

Untuk meningkatkan kualitas Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) sebagai mitra Pemerintah dalam mencegah dan mengatasi permasalahan Sosial, maka perlu di adakannya bimbingan teknis Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Provinsi Kalimantan Utara sebagai wadah dalam memantapkan komunikasi, kerjasama, pertukaran informasi dan pengalaman serta pengembangan kemampuan teknis bidang kesejahteraan sosial antar Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).



Bimtek LK3 dimaksudkan untuk Mensosialisasikan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2013 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga dan meningkatkan kualitas kinerja Petugas LK3 dalam melaksanakan tugas pelayanan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial .

Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas kinerja Petugas LK3 dalam melaksanakan tugas pelayanan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. Meningkatnya kemampuan Petugas LK3 untuk memahami dan memecahkan masalah sosial psikologis dalam keluarga, yang mengganggu pelaksanaan peran dan fungsinya sebagai pribadi, anggota keluarga, dan anggota kelompok sosial lainnya;

• **Tempat/waktu pelaksanaan**

Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga melalui dana dekonsentrasi Kementerian Sosial RI Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 dilaksanakan selama 2 (Dua) hari terhitung mulai :

Hari : Selasa s/d Rabu

Tanggal : 10 s/d 11 Juli 2018

Tempat : Hotel Pangeran Khar Tanjung Selor.

• **Peserta**

Peserta Bimbingan Teknis Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 adalah Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang berasal dari Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara dengan rincian.

1. Kabupaten Bulungan sebanyak 10 orang
2. Kota Tarakan sebanyak 10 orang



- **Narasumber**

Narasumber berasal dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 2 (dua) orang.

- **Dukungan operasional kegiatan :**

Dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga(LK3) pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara didukung sumber dana Dekonsentrasi Kemensos RI Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

Dana Dekonsentrasi Kemensos RI Tahun sesuai DIPA Satuan Kerja Pemerintah Daerah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut :

Nomor SP DIPA : 027.03.417730/2018

Kode Rekening : 2239.004.001.051.A

- **Panitia Pelaksana Kegiatan**

Dalam rangka mendukung kelancaran Kegiatan Bimbingan Teknis Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) melalui dana dekonsentrasi pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 064/SK/Dinsos/VI/2018

**e. Direktorat Jenderal Fakir Miskin**

**1. Bimbingan Teknis Penerima Manfaat KUBE**

**Pedesaan**

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial RI sejak tahun 1983 telah meluncurkan program penanganan kemiskinan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)



selama lebih kurang 28 tahun, KUBE masih merupakan ikon Kementerian Sosial. berdasarkan hasil penelitian Haryati Roebyantho dalam bukunya yang berjudul “Dampak Sosial Ekonomi Program Penanganan Kemiskinan melalui KUBE” yang diterbitkan oleh P3KS Press tahun 2012 dari hasil evaluasinya direkomendasikan bahwa KUBE masih merupakan program alternatif penanganan kemiskinan.

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara melalui Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Tahun 2017 melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Penerima Manfaat KUBE Perdesaan di Kabupaten Malinau dan Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

Kegiatan ini diharapkan mendapat respon positif bagi masyarakat agar nantinya kedepannya Program KUBE ini dapat berjalan baik untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial khususnya di wilayah Kalimantan Utara.

Adapun Tujuan kegiatan ini adalah

1. Membantu meningkatkan kesejahteraan Sosial;
2. Membantu pencapaian Program Kerja Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara.

Sasaran dari kegiatan Bimbingan Teknis Penerima Manfaat KUBE Pedesaan ini adalah :

1. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang nantinya menerima Bantuan KUBE agar dapat menjadi KUBE yang mandiri dan terbaik dan mampu mengentaskan kemiskinan;
2. Para pekerja maupun pendamping sosial;
3. Dinas Sosial terkait sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial RI khususnya Direktorat Penanggulangan Kemiskinan.



- **Tempat/Waktu Pelaksanaan Kegiatan.**

Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Penerima manfaat KUBE Perdesaan dilaksanakan selama 2 (dua) kali di dua Kabupaten diantaranya :

Tabel 4.13 tabel pelaksanaan KUBE

No	Kabupaten/Kota	Waktu Pelaksanaan
1.	Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan	Tanggal 22 November 2018
2.	Desa Binusan, Kecamatan Nunukan	Tanggal 23 November 2018

- **Peserta Kegiatan**

Adapun Peserta Kegiatan Bimtek Penerima manfaat KUBE Perdesaan ini yaitu warga masyarakat yang ada di Kabupaten Nunukan khususnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

- **Narasumber**

Masing – masing dari perwakilan :

1. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara;

- **Hasil Kegiatan**

- a. Proses Awal

Tahap persiapan telah dilaksanakan ± 1 bulan sebelum acara dilaksanakan, tahap persiapan meliputi:

- Penyusunan Kerangka Acuan Kerja;
- Penyusunan SK;
- Mengatur tempat pelaksanaan;
- Membuat spanduk;
- Menyiapkan administrasi lainnya.

- b. Proses Akhir

Setelah dilakukan Bimtek Penerima manfaat KUBE Perdesaan ini maka diharapkan para peserta yang mengikuti kegiatan dapat mengerti bagaimana program KUBE tersebut agar dapat meminimalisir kesalahan dalam menggunakan bantuan KUBE tersebut.

c. Rencana Tindak Lanjut

Kegiatan Bimtek Penerima manfaat KUBE Perdesaan perlu dilakukan karena untuk membantu mengawal, mengawasi dan melaporkan Program KUBE tersebut kepada Dinas terkait yang nantinya akan diteruskan kepada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial RI.



Gambar 4.33 Dokumentasi kegiatan  
(Sumber: Dokumentasi Panitia)



Gambar 4.34 Dokumentasi kegiatan  
(Sumber: Dokumentasi Panitia)



Gambar 4.35 Dokumentasi kegiatan  
(Sumber: Dokumentasi Panitia)



Gambar 4.36 Dokumentasi kegiatan



(Sumber: Dokumentasi Panitia)

## **2. Bimbingan Teknis Penerima Manfaat KUBE Perkotaan**

Masalah kemiskinan sangat kompleks, karena banyak aspek yang mempengaruhi seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Berbagai persoalan kemiskinan masyarakat memang menarik untuk disimak dari berbagai aspek sosial, ekonomi, psikologi dan politik. Aspek sosial terutama terbatasnya interaksi sosial dan penguasaan informasi. Aspek ekonomi akan tampak pada terbatasnya pemilikan alat produksi, upah kecil, daya tawar rendah, tabungan nihil, lemah mengantisipasi peluang. Dari aspek psikologi terutama akibat rasa rendah diri, fatalism, malas, dan rasa terisolir. Sedangkan dari aspek politik berkaitan dengan kecilnya kases terhadap berbagai fasilitas dan kesempatan, diskriminatif, posisi lemah dalam proses pengambilan keputusan.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial RI sejak tahun 1983 telah meluncurkan program penanganan kemiskinan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) selama lebih kurang 28 tahun, KUBE masih merupakan ikon Kementerian Sosial. berdasarkan hasil penelitian Haryati Roebyantho dalam bukunya yang berjudul “Dampak Sosial Ekonomi Program Penanganan Kemiskinan melalui KUBE” yang diterbitkan oleh P3KS Press tahun 2012 dari hasil evaluasinya direkomendasikan bahwa KUBE masih merupakan program alternatif penanganan kemiskinan.

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara melalui Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Tahun



2018 melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Penerima Manfaat KUBE Perkotaan di Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

Kegiatan ini diharapkan mendapat respon positif bagi masyarakat agar nantinya kedepannya Program KUBE ini dapat berjalan baik untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial khususnya di wilayah Kalimantan Utara.

Adapun Tujuan kegiatan ini adalah

1. Membantu meningkatkan kesejahteraan Sosial;
2. Membantu pencapaian Program Kerja Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara.

Sasaran dari kegiatan Bimbingan Teknis Penerima Manfaat KUBE Perkotaan ini adalah :

1. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang nantinya menerima Bantuan KUBE agar dapat menjadi KUBE yang mandiri dan terbaik dan mampu mengentaskan kemiskinan;
2. Para pekerja maupun pendamping sosial;
3. Dinas Sosial terkait sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial RI khususnya Direktorat Penanggulangan Kemiskinan.

• **Tempat/Waktu Pelaksanaan Kegiatan.**

Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Penerima manfaat KUBE Perkotaan dilaksanakan selama 1 (satu) hari di Kota Tarakan tanggal 16 November 2018 dan Kabupaten Bulungan tanggal 28 November 2018.

• **Peserta Kegiatan**

Adapun Peserta Kegiatan Bimtek Penerima manfaat KUBE Perkotaan ini meliputi warga masyarakat yang ada



di Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan khususnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

• **Hasil Kegiatan**

a. Proses Awal

Tahap persiapan telah dilaksanakan  $\pm$  1 bulan sebelum acara dilaksanakan, tahap persiapan meliputi:

- Penyusunan Kerangka Acuan Kerja;
- Penyusunan SK;
- Mengatur tempat pelaksanaan;
- Membuat spanduk;
- Menyiapkan administrasi lainnya.

b. Proses Akhir

Setelah dilakukan Bimtek Penerima manfaat KUBE Perkotaan ini maka diharapkan para peserta yang mengikuti kegiatan dapat mengerti bagaimana program KUBE tersebut agar dapat meminimalisir kesalahan dalam menggunakan bantuan KUBE tersebut.

c. Rencana Tindak Lanjut

Kegiatan Bimtek Penerima manfaat KUBE Perkotaan perlu dilakukan karena untuk membantu mengawal, mengawasi dan melaporkan Program KUBE tersebut kepada Dinas terkait yang nantinya akan diteruskan kepada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial RI.



Gambar 4.37 Dokumentasi kegiatan  
(Sumber: Dokumentasi Panitia)



Gambar 4.38 Dokumentasi kegiatan  
(Sumber: Dokumentasi Panitia)



Gambar 4.39 Dokumentasi kegiatan  
(Sumber: Dokumentasi Panitia)



Gambar 4.40 Dokumentasi kegiatan  
(Sumber: Dokumentasi Panitia)



Gambar 4.41 Dokumentasi kegiatan  
(Sumber: Dokumentasi Panitia)

### 3. Seleksi Pendamping KUBE Pedesaan

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara melalui Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Tahun 2018 melaksanakan Kegiatan Seleksi Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Pedesaan di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan ini diharapkan mendapat respon positif bagi masyarakat agar nantinya kedepannya Program KUBE ini dapat berjalan baik untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial khususnya di wilayah Kalimantan Utara.

Adapun dalam Seleksi Pendamping KUBE ini akan terpilih beberapa pendamping setelah melalui serangkaian seleksi dan tes yang nantinya sebagai perpanjangan tangan Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara untuk mengawal pelaksanaan Program KUBE tersebut.

Tujuan dari kegiatan ini adalah



1. Memperoleh Pendamping KUBE untuk mengawal Program KUBE tersebut ketika sudah berjalan;
2. Membantu meningkatkan kesejahteraan Sosial;
3. Membantu pencapaian Program Kerja Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara.

Sasaran dari kegiatan seleksi pendamping KUBE ini adalah :

1. Terpilihnya Pendamping KUBE Pedesaan di Kabupaten Nunukan melalui seleksi dan serangkaian tes yang nantinya akan dipilih oleh tim penilai;
2. Terwujudnya Program KUBE yang dapat membantu Kesejahteraan Sosial;
3. Terlaksananya pelaksanaan program Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara khususnya Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Tahun 2018.

- **Tempat/Waktu Pelaksanaan Kegiatan.**

Pelaksanaan Kegiatan Seleksi Pendamping KUBE Pedesaan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari di dua Kabupaten diantaranya :

Tabel 3.14 Tabel pelaksanaan Kube

No	Kabupaten/Kota	Waktu Pelaksanaan
1.	Nunukan	Tanggal 26- 28 Maret 2018

- **Peserta Kegiatan**



Adapun Peserta Kegiatan Seleksi Pendamping KUBE Pedesaan ini meliputi warga masyarakat yang ada di tiap Kabupaten Nunukan dengan jumlah peserta yang mengikuti seleksi sebanyak 12 orang.

- **Tim Penilai**

Masing – masing dari perwakilan :

1. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara
2. Dinas Sosial Kab. Nunukan

- **Dukungan Operasional Kegiatan :**

- a. Dukungan Anggaran

Dalam Kegiatan Seleksi Pendamping KUBE Pedesaan ini didukung sumber dana Dekonsentrasi Kementerian Sosial RI Melalui Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

Dana Dekonsentrasi Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara sesuai DIPA Tahun Anggaran 2018 dengan Nomor DIPA: 027.03.417730 dan Kode Rekening : 2239.001.001 051 A

- b. Dukungan Operasional

Dalam rangka mendukung kelancaran Kegiatan Seleksi Pendamping KUBE Pedesaan pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara khususnya Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Tahun 2018 maka dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Seleksi Pendamping KUBE Pedesaan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 064/Dinsos/SK/II/2017.

- **Materi**

Materi ujian yang diberikan untuk Seleksi Pendamping KUBE Pedesaan ini melalui 2 (dua) tahap yaitu :

1. Ujian tertulis
2. Tes wawancara.



Gambar 4.42 Dokumentasi kegiatan  
(Sumber: Dokumentasi Panitia)



Gambar 4.43 Dokumentasi kegiatan  
(Sumber: Dokumentasi Panitia)



Gambar 4.44. Dokumentasi kegiatan  
(Sumber: Dokumentasi Panitia)

#### **4. Seleksi Pendamping KUBE Perkotaan**

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara melalui Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Tahun 2018 melaksanakan Kegiatan Seleksi Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Perkotaan di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan ini diharapkan mendapat respon positif bagi masyarakat agar nantinya kedepannya Program KUBE ini dapat berjalan baik untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial khususnya di wilayah Kalimantan Utara.

Adapun dalam Seleksi Pendamping KUBE ini akan terpilih beberapa pendamping setelah melalui serangkaian seleksi dan tes yang nantinya sebagai perpanjangan tangan Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara untuk mengawal pelaksanaan Program KUBE tersebut.

Tujuan dari kegiatan ini adalah

1. Memperoleh Pendamping KUBE untuk mengawal Program KUBE tersebut ketika sudah berjalan;
2. Membantu meningkatkan kesejahteraan Sosial;
3. Membantu pencapaian Program Kerja Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara.

Sasaran dari kegiatan seleksi pendamping KUBE ini adalah :

1. Terpilihnya Pendamping KUBE Perkotaan di Kota Tarakan melalui seleksi dan serangkaian tes yang nantinya akan dipilih oleh tim penilai;
2. Terwujudnya Program KUBE yang dapat membantu Kesejahteraan Sosial;
3. Terlaksananya pelaksanaan program Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara khususnya Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Tahun 2018.

• **Tempat/Waktu Pelaksanaan Kegiatan.**

Pelaksanaan Kegiatan Seleksi Pendamping KUBE Perkotaan dilaksanakan selama 2 (dua) hari di Kota Tarakan.

• **Peserta Kegiatan**



Adapun Peserta Kegiatan Seleksi Pendamping KUBE Perkotaan ini meliputi warga masyarakat yang ada di Kota Tarakan dengan jumlah 10 orang.

- **Tim Penilai**

1. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara
2. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

- **Dukungan Operasional Kegiatan :**

- a. Dukungan Anggaran

Dalam Kegiatan Seleksi Pendamping KUBE Perkotaan ini didukung sumber dana Dekonsentrasi Kementerian Sosial RI Melalui Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

Dana Dekonsentrasi Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara sesuai DIPA Tahun Anggaran 2018 dengan Nomor DIPA :  
027.03.417730 dan Kode Rekening :  
2239.001.001.051 A

- b. Dukungan Operasional

Dalam rangka mendukung kelancaran Kegiatan Seleksi Pendamping KUBE Perkotaan pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara khususnya Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Tahun 2018 maka dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Seleksi Pendamping KUBE Perkotaan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Nomor :  
088/Dinsos/SK/III/2018.



- **Materi**

Materi ujian yang diberikan untuk Seleksi Pendamping KUBE Perkotaan ini melalui 2 (dua) tahap yaitu :

1. Ujian tertulis
2. Tes wawancara.



### **C. Keterlibatan SKPD dalam Kegiatan Lainnya**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara mengembang 2 (dua) Urusan Pemerintahan yang termasuk Urusan Wajib, yaitu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Urusan pemerintahan bidang sosial. Selain menyelenggarakan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBD dan APBN di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018, namun Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018 juga berpartisipasi dalam kegiatan di luar SKPD baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah lainnya yang berhubungan dengan Tupoksi Dinsos baik mengikuti rapat, seminar, sosialisasi, konsultasi dan koordinasi, monitoring dan pembinaan serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tupoksi Dinsos baik yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara maupun di Luar wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Adapun rincian keterlibatan Dinsosnakertrans dalam kegiatan lainnya dapat dilihat pada Lampiran I.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Permasalahan

Berdasarkan hasil laporan realisasi anggaran Belanja Langsung APBD Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan Tanggal 31 Desember 2018 mencapai realisasi keuangan sebesar 78,47% dan realisasi fisik sebesar 88,44% dan realisasi Belanja Langsung UPTD Panti Sosial Tresna Wrdha Marga Rahayu sebesar 92,85% dan realisasi fisik 100%. Sehingga realisasi total anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara dengan UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Lansung sebesar 82,73% dan realisasi fisik 99.21%. Selain APBD, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan APBN yang mencapai realisasi keuangan 82,31% dan realisasi fisik 88,38%.

Kinerja merupakan program yang bertujuan meningkatkan tata kelola dalam penyediaan layanan publik. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) Lingkungan Internal/Eksternal
- 2) Pimpinan
- 3) Sumber Daya Manusia
- 4) Keratifitas, Inovasi dan Motivasi
- 5) Imbalan/Pendapatan
- 6) Kebijakan
- 7) Rasionalisasi

Beberapa permasalahan yang menyebabkan kurang optimalnya realisasi kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:



## I. APBD

- a. Kegiatan pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal tidak dapat terlaksana dikarenakan tidak adanya data anak terlantar;
- b. Untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma tidak dapat terlaksana dikarenakan kekhawatiran dari orang tua untuk mengizinkan anaknya mengikuti pelatihan selama satu bulan dan ada anak yang sudah melebihi batas umur (18th) yang tidak lagi dikategorikan dalam anak dibawah umur;
- c. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS tidak dapat terlaksana karena keterlambatan instansi lain (pihak Kabupaten) menutup lokalisasi;
- d. Dalam kegiatan Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak dana yang tersedia merupakan dana *stand by*, kegiatan dapat terlaksana jika ada permasalahan terkait;
- e. Pada kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa masih dalam proses pencarian ke masing-masing rekening relawan Tagana dan sebagian dana yang tersedia merupakan dana *stand by*, kegiatan dapat terlaksana jika ada permasalahan terkait;

## II. APBN

- a. Sekretariat Jenderal  
Dana pengiriman laporan tidak terealisasi karena pengiriman laporan sudah online.
- b. Ditjen Pemberdayaan Sosial



- Adanya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang sudah tidak aktif dan tidak mengirimkan laporannya;
  - Belum adanya penunjukan pendamping sosial KAT.
- c. Ditjen Rehabilitasi Sosial
- Tidak terlaksananya penutupan lokasi di Kab. Nunukan sehingga Bansos WTS tidak dapat direalisasikan;
  - Terjadinya Kasus PMKS Korban Perdagangan Orang (KPO), relatif kecil;
  - Para Penyandang Disabilitas yang membutuhkan alat bantu fisik, relatif berkurang.
- d. Ditjen Perlindungan Dan Jaminan Sosial
- Dana pengerahan TAGANA tidak terealisasi sepenuhnya karena bencana yang terjadi relative kecil.
- e. Ditjen Penanganan Fakir Miskin
- Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) KUBE belum memenuhi target, dari 1000 KPM hanya 922 yang terealisasi;
  - Belum adanya pengajuan proposal KUBE untuk alokasi 2019.

## **B. Rencana Tindak Lanjut**

Beberapa kendala yang menyebabkan kurang optimalnya realisasi kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara dapat ditindaklanjuti dengan beberapa solusi penyelesaiannya untuk memperbaiki kinerja OPD pada tahun berikutnya diantaranya:

- a. Memperbaiki sistem perencanaan terutama dalam penyusunan RKA.
- b. Meningkatkan kapasitas ASN dengan mengikuti pelatihan yang sesuai dengan tupoksi OPD.



- c. Meningkatkan koordinasi yang baik dengan OPD/ Instansi lainnya (Kab./ Kota) terutama terkait dengan program lintas sector yang telah disepakati bersama.
- d. Membangun kerjasama yang baik, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis serta membangun semangat kebersamaan dalam mencapai target OPD.
- e. Menyeragamkan format proposal KUBE di tahun 2019.
- f. Meningkatkan pelayanan cepat tanggap darurat agar korban bencana dapat tertangani lebih baik lagi.
- g. Menghibaukan untuk Tagana dapat mempercepat pelaporan pelaksanaan kegiatan per triwulan.
- h. Menambah jumlah personil tim reaksi cepat bencana memberikan pelatihan penguatan kapasitas SDM Tagana.
- i. Menghimbau ke Kab./Kota untuk dapat mempercepat penyampaian proposal.

Tanjung Selor, 04 Februari 2019  
Kepala Dinas,

**Drs. H. Sugiono, M.Si**  
**Pembina Utama Madya (IV/d)**  
**NIP. 19590609 198603 1 019**